Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA
Dr. H. Iman Fadhilah, M.SI
Nur Rois, M.Pd.I
Aris Abdul Ghoni, M.Pd
Imam Khoirul Ulumuddin, M.Pd.I.

IMPLEMENTASI

MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA

PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

Wahid Hasyim University Press

unwahas

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG – INDONESIA

www.unwahas.ac.id

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

Penulis

Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A
Dr. H. Iman Fadhilah, M.SI.
Nur Rois, M.Pd.I.
Aris Abdul Ghoni, M.Pd.
Imam Khoirul Ulumuddin, M.Pd.I.

Wahid Hasyim University Press

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

Penulis :
Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A
Dr. H. Iman Fadhilah, M.SI.
Nur Rois, M.Pd.I.
Aris Abdul Ghoni, M.Pd.
Imam Khoirul Ulumuddin, M.Pd.I.

ISBN :
978-623-5360-10-2
Editor :
Ummu Jauharin Farda, M.Pd.
Penyunting :
Hamid Sakti Wbowo, M.S.I
Desain Sampul dan Tata Letak :
Abu Nizar
Penerbit :
Wahid Hasyim University Press
Redaksi :
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan
Semarang 50236
Tel (024) 8505680 – 5805680
Fax (024) 8505680
Email : wahidhasyimpress@unwahas.ac.id

Cetakan Pertama, Januari 2024

@Copyright Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul **"Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum"**. Buku ini dilatar belakangi oleh fenomena meningkatnya radikalisme dan intoleransi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Radikalisme dan intoleransi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta merusak nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menanamkan sikap dan perilaku moderat, toleran, dan cinta tanah air di kalangan mahasiswa, sebagai calon pemimpin dan agen perubahan bangsa.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan tentang moderasi beragama dan bela negara, sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstremisme di kalangan mahasiswa perguruan tinggi umum. Buku ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pertama yang membahas tentang konsep, strategi, dan program GMBBN, serta bagian kedua yang menyajikan hasil penelitian dan studi kasus tentang fenomena radikalisme dan ekstremisme di beberapa perguruan tinggi umum, serta solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi materi, metode, maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, agar buku ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan

buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Moderasi Beragama dan Bela Negara di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Umum.

Semarang, Januari 2024

TIM PENULIS

SINOPSIS

Radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda, khususnya mahasiswa, perlu dibekali dengan sikap dan perilaku moderat, toleran, dan cinta tanah air, agar dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi bangsa. Perguruan tinggi umum memiliki peran penting dalam menanamkan moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa, melalui kurikulum, kegiatan, dan budaya akademik yang mendukung.

Bagaimana konsep dan implementasi moderasi beragama dan bela negara di perguruan tinggi umum? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa terhadap isu-isu kebangsaan dan keberagaman?

Buku yang berjudul **"Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum"** adalah sebuah buku yang membahas tentang pentingnya Moderasi Beragama dan Bela Negara di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. Buku ini menguraikan konsep, strategi, dan program penguatan Moderasi Beragama dan Bela Negara yang difasilitasi oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Buku ini juga menyajikan hasil penelitian dan studi kasus tentang fenomena radikalisme dan ekstremisme di beberapa perguruan tinggi umum di Indonesia, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulanginya. Buku ini ditulis oleh beberapa akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki kompetensi

dan pengalaman di bidang moderasi beragama dan bela negara.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami dan mengamalkan moderasi beragama sebagai cara beragama yang adil, seimbang, toleran, dan anti-kekerasan, serta bela negara sebagai komitmen kebangsaan yang akomodatif terhadap keragaman budaya dan agama. Buku ini juga memberikan gambaran tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa perguruan tinggi umum dalam menghadapi isu-isu radikalisme dan ekstremisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Buku ini menawarkan solusi dan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan kolaboratif, melalui program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) yang diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan inspirasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, agama, dan pertahanan, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Umum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
SINOPSIS v
DAFTAR ISI vii
BAB I
KONSEP MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA 1
A. Moderasi Beragama 3
B. Bela Negara 18
BAB II
GRIYA MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM 53
A. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum 54
B. Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum 77
C. Implikasi Moderasi Beragama dan Bela Negara Pada Perguruan Tinggi Umum 102
BAB III
KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM 134
A. Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum 134
B. Evaluasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum 137

BAB IV

MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA SEBAGAI STRATEGI DAN PENCEGAHAN RADIKALISME PADA PERGURUAN TINGGI UMUM 142

A. Strategi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum 142

B. Pencegahan Radikalisme melalui Moderasi Beragama dan Bela Negara di Perguruan Tinggi Umum 150

REFLEKSI 155

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
KONSEP MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA

Peningkatan isu radikalisme dan intoleransi di Indonesia semakin diperhatikan seiring dengan temuan yang mengungkap adanya paparan terhadap fenomena tersebut di sebagian kampus di negara tersebut. Kehadiran radikalisme dan intoleransi dalam lembaga pendidikan, termasuk di kampus-kampus Perguruan Tinggi Umum (PTU), menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, seperti akademisi, agamawan, masyarakat sipil, serta pemerintah pusat dan daerah. Fokus pada isu radikalisme dan intoleransi semakin meningkat seiring dengan temuan yang mengindikasikan bahwa banyak kampus di Indonesia terpengaruh oleh fenomena tersebut.[1]

Menanggulangi radikalisme dan intoleransi bukanlah tugas yang mudah dan sederhana. Ini karena radikalisme bukan sekadar gerakan sosial, tetapi lebih merupakan hasil dari wacana dan tindakan yang berasal dari ideologi tertentu.[2] Tidak mungkin untuk mengatasi ideologi hanya dengan pendekatan militer dan keamanan semata, atau dengan pendekatan struktural saja, seperti melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Begitu pula, penanganan ideologi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum dan regulasi, seperti implementasi Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

---

[1] N. Hidayat I. Ibrahim, D. Wulansari, "Alternatives to Radicalism," *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 3, no. 3 (2017): 1554–1564.

[2] S. Ma'arif, "Islam Dan Pendidikan Plu Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis *Annual Conference on Islamic Studies Proceeding* (Bandung, 2006).

Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan.

Beberapa kejadian teror terbaru pada awal tahun 2021, seperti bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan serangan terhadap Markas Besa Polri oleh seorang perempuan berhijab pada 31 Maret 2021, menegaskan bahwa radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman yang nyata dan harus ditangani secara serius dan komprehensif. Laporan Global Index Terrorism (GTI) tahun 2020, yang diterbitkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 37 (dengan skor 4.6) dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme secara global. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menempati posisi ke-4.[3]

Namun, kita perlu menyadari bahwa kampus, sebagai lingkungan yang dihuni oleh kalangan akademisi dan intelektual, tidak terbebas dari risiko infiltrasi dan penyebaran paham radikal yang ekstrem. Mahasiswa dianggap sebagai aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh agen-agen ideologi radikal transnasional, karena mereka akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.[4] Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk melindungi mahasiswa dari pengaruh dan propaganda ideologi ekstrem-radikal dengan mempromosikan ideologi moderat dan toleran secara luas. Hal ini penting karena ideologi radikal transnasional yang saat ini menyebar cenderung mengabaikan fondasi dan

[3] Yusuf Hanafi, "MENDESAIN PEMBELAJARAN ISLAM (PAI) BERWAWASAN MODERASI BERAGAMA UNTUK MEMBENTUK PESERTA DIDIK YANG TOLERAN DAN MULTIKULTURAL" (Malang, 2021), http://
2.pdf.

[4] T. Rahardjo, "Radikalisme Di Kalangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019, http://lipi.go.id/berita/single/RADIKALISME-DI-KALANGANMAHASISWA-%0ASUDAH-MENGKHAWATIRKAN/18630.

komitmen nasional yang telah dibangun dan dipelihara selama ini.[5]

Untuk mempercepat implementasi moderasi beragama PTU, perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi guru, dosen, dan pengawas PAI. Implementasi moderasi beragama dewasa ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri kalua mengacu pada sebaran perguruan tinggi se-Indonesia yang berjumlah 30.638 dengan sebaran prodi yang berjumlah 30.638 dengan jumlah mahasiswa 264.267 dengan konsentrasi agama yang diimbangin dengan data dosen ber NIDN sejumlah 7173 pada PTU.

A. Moderasi Beragama

Moderasi beragama dan bela negara pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah perjalanan bangsa Indonesia. Keduanya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila pertama, kedua dan ketiga, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia. Namun, belakangan ini keduanya diuji dengan muncul dan berkembangnya aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang berupaya mendelegitimasi eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama dan bela negara menjadi keharusan dalam upaya menghalau segala bentuk ancaman yang timbul, baik ancaman yang berasal dari dalam negeri (internal) maupun ancaman yang berasal dari luar (eksteral).

Hal penting tentang negara adalah hubungan negara

[5] M. Adnan Madjid, Eri R. Hidayat, and N CONFLICT IN INDONESIA," *PINISI International Journal of Social Sciences* 3, no. 3 (December 5, 2017): 268–79, https://doi.org/10.20319/pijss.2017.33.268279.

dengan agama. Wacana ini mendiskusikan tentang posisi agama dalam konteks negara modern (*nation state*). Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pemikir muslim hingga kini. Perdebatan itu telah berlangsung sejak lama, hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*dien*) dan negara (*daulah*).

Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelarsaskan antara *dien* dan *dawlah* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Seperti halnya percobaan demokrasi di sejumlah negara dunia, penyelarasan *dien* dan *dawlah* di banyak negara-negara muslim yang berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi di kalangan negara-negara muslim dewasa ini semakin menambah maraknya perdebatan Islam dan negara.[6] Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komperhensif ini pada dasarnya dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama dan negara.

Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan

[6] Ubaidillah and Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

kemakmuran. Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan. Bagi Gus Dur negara adalah *al-Hukm* - hukum atau aturan. Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif sehingga etik kemasyarakatanlah yang diperlukan. Karenanya menurut Gus Dur Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila para warga negaranya memperjuangkan sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi.[7]

Pemikiran Gus Dur tersebut sejalan dengan Pemikiran Qamaruddin Khan, Dosen Universitas Karachi, yang mengatakan bahwa tujuan al-Qur'an bukanlah menciptakan sebuah negara melainkan sebuah masyarakat, sehingga tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri. Oleh karena itu, apa pun bentuk serta wujud suatu negara jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam.[8] Ketiadaan penjelasan resmi tentang Negara memungkinkan Islam untuk mengikuti kemajuan zaman dan menyesuaikan diri terhadap kondisi dan lingkungan, tempat ia tumbuh dan berkembang.

1. Konsep Moderasi Beragama

   Beragama dari kata Agama, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa agama/agama/ *n* ajaran merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan

[7] Abdurrahman Wahid, "Nasionalisme, Tasawwuf, Dan Demokratisasi," *Kompas*, 2001.

[8] Asghar Ali Enginer, *Devolusi Negara Islam, Terj. Imam Muttaqin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 59.

peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan beragama/beragama/ *v* **1** menganut (memeluk) agama: *saya beragama Islam dan dia beragama Kristen*; **2** beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama): *ia datang dari keluarga yang beragama;*

Agama diperlukan bagi manusia, terdapat beberapa alasan, antara lain: *pertama*, agama merupakan fitrah azasi manusia (QS al-A'raf: 172 & QS al-Rum: 30). *Kedua,* adanya kekurangan dan kelemahan manusia, sehingga memerlukan agama untuk menutupinya. *Ketiga*, adanya tantangan yang dihadapi manusia baik tantangan dari dalam diri manusia sendiri atau tantangan dari luar terutama terkait suasana hidup dan perkembangan zaman yang silih berganti. *Keempat,* manusia ingin maju dan berkembang (Mudzakkir Ali: PSI). Atas dasar bahwa semua manusia butuh agama, maka keberagamaan seseorang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan tidak bisa dipaksakan (QS al-Baqarah: 256).

Agama (disamping akal, jiwa, keturunan/harga diri dan harta) menjadi hak azasi manusia (imam Satibi disebut *Dlaruriyyat al-khamsah*) sebagai tujuan (maqashid) syari'ah. Agama sebagai hak dasar manusia, maka orang yang memeluk agama (beragama) sesuai pilihan dan keyakinannya, harus dihormati. Meski keyakinan beragama sebagai potensi faktor internal, namun dalam pelaksanaan agamanya, terdapat keterlibatan pihak faktor eksternal (orangtua, pendidikan, lingkungan, dsb) yang mempengaruhinya, sebagaimana Hadits Nabi: *Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orangtuanya lah yang*

menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi (HR Bukhari).

Secara terminologis, agama sebagai peraturan ilahiyah yang mengantarkan manusia melalui ikhtiarnya sendiri menuju tercapainya kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (Mudzakkir Ali; PSI). Dari sinilah, seharusnya agama sebagai pilar perdamaian dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya pada akhir-akhir ini, seringkai agama disalahgunakan dalam kehidupan sosial, bahkan perilaku radikal dilakukan atas nama agama. Di sinilah perlunya moderasi beragama.

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin Moderatio, artinya ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap berkelebihan dan berkekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi, yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa--biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata--rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak).

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah--tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Kata wasith diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara

yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Kata wasathiyah juga diartikan sebagai "pilihan terbaik". Kata wasath juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata "pemberani", yang berarti sikap di antara penakut (al-jubn) dan nekad (tahawur), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Dengan demikian, Moderasi merupakan keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkurangan dan tidak juga berlebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Titik tekan sikap moderasi tidak harus dalam kadar yang sama diantara dua kutub yang berhadapan. Bisa jadi yang berlebih sedikit atau berkurang sedikit tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Prosentasi yang dipilih sesuai dengan kemaslahatan yang lebih dominan.

Maka yang dimaksud Moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama pada jalur yang moderat. Dalam bahasa lain adalah tidak berlebihan (ekstrim) dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama serta memposisikan diri di tengah, dengan berpedoman pada prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Sikap moderat dalam beragama mencakup: keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. Maka, bukanlah suatu yang hal mengherankan, jika terdapat perbedaan di kalangan para ulama' dalam menyimpulkan

ciri-ciri sikap moderasi, sebab moderasi bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan sikap ini penerapannya harus diupayakan terus menerus dalam berbagai bentuknya.

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkokoh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Beragamnya agama di Indonesia memerlukan pengembangan wawasan dan sikap moderasi beragama, sehingga terbangun sikap saling pengertian, memahami keragaman, dan memperkuat persatuan antar umat beragama. Hal ini dilakukan dengan mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan yang berlebihan dan ekstrem, justru mengingkari nilai kemanusiaan atas nama agama. Pemahamaan dan pengamalan agama berlebihan, melampaui batas, dan ekstrem adalah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama, dimana seseorang merasa bahwa paham tafsir keagamaannya sajalah yang paling benar, lalu memaksa orang lain yang berbeda untuk mengikuti pahamnya, bahkan bila perlu dengan paksaan dan kekerasan. Pemahaman berlebihan justru merongrong atau mengancam, bahkan merusak ikatan kebangsaaan. Contoh: pemahaman orang atas nama agama lalu menyalahkan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak diajarkan agama. Ini yang disebut melampaui batas dan berlebihan dalam beragama.

2. Dasar Nash Moderasi beragama

Di dalam al-Quran, kata wasathiyah, sekurang-kurangnya disebut 5 kali, yakni: QS al-Baqarah: 143 (وسطا) dan 238 (الوسطى), QS al-Maidah: 89 (اوسط), QS al-Qalam: 28 (اوسطهم) dan QS al-'Adiyat: 5 (فوسطن).

Firman Allah Swt.:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat **yang adil dan pilihan** agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia".* (QS. al-Baqarah: 143).

Firman Allah Swt.:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

*Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) **shalat wusthaa**. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu' (QS al-Baqarah: 238).*

Firman Allah Swt.:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS al-Maidah: 89).

Firman Allah Swt.:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

*Artinya: Berkatalah seorang **yang paling baik pikirannya** di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)? (QS al-Qalam: 28)*

Firman Allah Swt.:

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

*Artinya: dan menyerbu ke **tengah-tengah** kumpulan musuh, (QS*

al-'Adiyat: 6).

Dari 5 ayat tersebut, kata wasathiyah memiliki beragam arti terjemahnya, tetapi semuanya mengandung satu makna yaitu: adil dan pilihan, tengah-tengah, pikiran yang baik, tidak ekstrim. Ini mengandung maksud bahwa beragama yang baik atau pola pikir beragama yang baik adalah pola pikir jalan tengah.

Ayat-ayat al-Quran yang semakna atau mengandung wasathiyah adalah menegakkan keadilan (**القسط**), sekurang-kurangnya disebut 22 kali, antara lain: QS Ali Imran: 18, 21, QS al-Nisa': 127, 135, QS al-Maidah: 8, 42, QS al-An'am: 152, QS al-A'raf: 29, QS Yunus: 4, 47, 54, QS Hud: 85, QS al-Anbiya': 47, QS al-Rahman: 9, dan QS al-Hadid: 25. Disebut juga dengan isim tafdlil (أقسط) antara lain: QS al-Baqarah: 282, QS al-Ahzab: 5, dan disebut dengan kata kerja (fi'il) berupa perintah (أقسطوا و) larangan (لأتقسطوا), isim fail (المقسطين -القاسطون) dan fiil mudlori' (تقسطوا), antara lain: QS al-Nisa': 3, QS alHujurat: 9, QS al-Mumtahanah: 8, QS al-Jinn: 14-15. Demikian juga ayat-ayat al-Quran yang memakai kata adil (**العدل**), sekurang-kurangnya disebut 24 kali, antara lain: QS al-Baqarah: 48, 123, 282, QS al-Nisa': 3, 58, 129, 135, QS al-Maidah: 8, 95, 106, QS al-An'am: 1, 70, 115, 150, 152, QS al-A'raf: 159, 181, QS al-Nahl: 76, 90, QS al-Naml: 60, QS al-Syura: 15, QS al-Hujurat: 9, QS al-Thalaq: 2, dan QS al-Infithar: 7.

Ayat lain yang mengandung makna wasathiyah dengan menggunakan kata **القصد** yang artinya tengah atau lurus juga terdapat dalam al-Quran, antara lain: QS al-Nahl: 9, QS Luqman: 19, dan ada yang menggunakan kata **مقتصد** (pertengahan), terdapat pada QS al-Maidah: 66, QS Luqman: 32 dan QS Fathir: 32.

Disamping ayat-ayat yang secara lafdliyah menunjuk wasathiyah, tetapi juga terdapat beberapa ayat yang secara maknawi berisi wasathiyah, antara lain: QS al-Isra': 29, 110, dan QS al-Furqon: 67.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal* (QS al-Isra': 29).

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

Artinya: *dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu*". (QS al-Isra': 110)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian* (QS al-Furqon: 67)

Dalam Hadits Nabi hampir tidak ditemukan kata وسطية yang berarti moderasi. Hanya ada satu dalam kitab *Jâmi'al-Usûl fî Ahâdîth al-Rasûl* yang ditulis Ibn al-Athîr, خير الامور اوسطها (sebaik-baik perkara adalah pertengahan).7 Demikian juga al-Baihaqy dalam *al-jami li su'ab al-iman* dengan lafad yang berbeda yaitu خير االاعمال اوسطها (sebaik-baik perbuatan adalah pertengahan). Beberapa kata yang sepadan maknanya dengan kata وسطية adalah kata القصد yang memiliki padanan kata التوسط dan االاعتدال yang juga bermakna pertengahan.

3. Indikator Moderasi beragama

Dalam buku saku Moderasi Beragama yang diterbitkan

Kemenag RI tahun 2019, halaman 43, bahwa Indikator moderasi beragama mencakup 4 hal, yaitu:

a. Komitmen kebangsaan, berkaitan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya
b. Toleransi, sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan dan disertai sikap hormat.
c. Anti-kekerasan. Munculnya radikalisme adalah Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror. Maka ini harus dicegah.
d. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal, memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama

4. Nilai- Nilai Islam dalam Moderasi Beragama

Seperti dalam paparan penulis pada kegiatan Sarasehan FKUB Propinsi Jawa Tengah, Tema: Paradigma Aswaja dalam Memperteguh Moderasi Beragama, tanggal 29 September 2022 di IAIN Salatiga, bahwa Nilai-nilai Islam dalam moderasi beragama, meliputi: nilai fitrah, rahmat, manusiawi, realitas budaya, dukungan negara, pendalaman agama komprehensif, hak Tuhan.

a. Fitrah

Seperti disinggung di muka bahwa agama merupakan Fitrah azasi manusia (QS al-A'raf: 172 & QS al-

Rum: 30), bahwa semua manusia butuh agama, tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan tidak bisa dipaksakan (QS al-Baqarah: 256), bahkan agama adalah hak azasi manusia yang harus dihormati.

b. Rahmat

Agama sebagai Rahmat Tuhan bagi semua, rahmatan lil 'alamin (QS al-Anbiya': 107). Dengan kata lain, kapan pun dan di mana pun agama (Islam) berada, memberikan garansi bagi keselamatan dan kedamaian umat manusia di sekelilingnya (QS Ibrahim: 1), bukan merupakan ancaman. peran ulama/ahli agama untuk mendakwahkannya agar manusia tidak seperti binatang (Hadits Nabi), tetapi memiliki etika, memegang kebenaran, menjalani ibadah, dsb. yang akan membentuk peradaban manusia.

c. Manusiawi

Memahami dan mengamalkan Agama, disamping sebagai realisasi kesadaran, tetapi lebih didasarkan pada kemampuan manusia (QS al-Taghabun: 16), kualitas keberagamaan orang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang kuat shalatnya saja, ada yang kuat zakatnya, ada yang akhlaknya, dsb. perbedaan latar belakang, minat, tujuan, kecenderungan, dsb. yang dimiliki manusia. mendakwahkan agama bagi orang lain perlu kelembutan (QS Ali Imran: 159) untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjalankan agama. Kata al-Ghazali: Berbudi baik terhadap manusia adalah dengan tidak memaksakan mereka menuruti kehendakmu, bahkan harusnya kamu yang mengikuti arus mereka sepanjang tidak menyalahi syari'at.

d. Realitas Budaya

Pengamalan agama dipengaruhi oleh realitas budaya. Indonesia sebagai negara yang multikultur juga ikut mempengaruhi pelaksanaan agama. Ulama Usul menyusun kerangka berfikir *Fiqh Waqi'i* (konsep fiqh berorientasi pada realitas), diantaranya : "*Al-Hukm yaduru ma'a al-illah wujudan wa 'adaman*." (Ada dan tidak adanya hukum sangat bergantung kepada illatnya). *Taghyir al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*. (hukum berubah mengikuti perubahan zaman). *Taghayyur al-fatawa wa ikhtilafuha bi hasab taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-'awa-id* (Perubahan fatwa tidak boleh mengesampingkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan) dan lain-lain.

e. Dukungan Negara

Pelaksanaan ketaatan beragama memerlukan dukungan negara yang damai, seperti dicontohkan, Nabi Ibrahim berdoa agar negaranya aman dan rizki melimpah (QS al-Baqarah: 124, QS Ibrahim: 35). Sumpah Allah terhadap negara menunjukkan arti pentingnya (QS al-Balad: 1, QS al-Tin: 3) kemudian diikuti ayat "sungguh Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk". Perlunya syukur terhadap negara/tanah air yang baik (QS al-A'raf: 58, QS Saba': 15), terlebih terhadap tanah kelahiran (QS al-Balad:2). Taat kepada Pemerintah Negara mendapat posisi khusus yaitu sesudah taat kepada Allah dan Rasulnya (QS al-Nisa': 59, 83), larangan jangan merusak bumi (QS al-A'raf: 56, 85), bahkan ulama NU memfatwakan: Cinta tanah air adalah bagian iman (حب الوطن منالايمان).

f. Pendalaman Agama Komprehensif

Moderasi beragama dapat dicapai dg mendalami agama secara komprehensif. Ajaran agama mencakup 4

komponen yang tidak bisa dipisahkan: aqidah (creed/sistem keyakinan), ibadah (cult/sistem ritual), muamalah (community/ system kemasyarakatan), dan akhlak (code/system etika). Sumber ajaran mencakup: al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas, untuk dilaksanakannya secara utuh, tidak sepotong- sepotong, terutama pada ayat-ayat / hadits yang sensitif. Metode pemahaman (al-Jabiri), mencakup: Bayani (sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas/teks), irfani (sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada rasa/hati nurani) dan burhani (sistem pengetahuan yang berbasis pada akal), yang ketiganya perlu berjalan bersama, tidak dipisahkan. Ulama di Nusantara menggabungkan Syariat, thariqat dan hakikat secara simultan, yang mewariskan budaya damai/harmonis bagi bangsa Indonesia.

g. Hak Tuhan

Kualitas keberagamaan adalah hak prerogratif Tuhan, dalam arti bahwa yang menilai orang paling benar dalam Beragama hanyalah Allah (QS al-Baqarah: 64). Kepada Allah saja tempat kembali (QS al-Baqarah: 46, 156, QS al-Anbiya: 93, QS al-Mukminun: 60). Di hari qiyamat yang berkuasa hanya Allah (QS al-Fatihah: 4, QS al-Hajj: 56, QS al-Nur: 25, QS al-Furqan: 26, QS al-Jatsiyah: 27, QS al-Infithar: 19, QS al-'Adiyat: 11). Sikap fanatik berlebihan hanya melahirkan perilaku negative, seperti: sikap memaksakan pendapat hingga gunakan kekerasan, berbuat intoleren, mudah menuduh kelompok lain sebagai ahli bid'ah, sesat dan khurafat, menjadikan kelompoknya eksklusif, tidak mau melakukan perubahan, menolak argumen orang lain, dll.

B. Bela Negara

1. Konsep Bela Negara

Bela Negara merupakan istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam konteks konstitusional, bela negara merupakan kewajiban dan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Konsep bela negara memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pencapaian cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan semua keturunan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta berperan dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang muncul dari rasa cinta mereka terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertahanan RI no. 8 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan kesadaran bela negara, pada pasal 1 ayat (2) bahwa bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan

negara, yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Tujuan usaha bela negara adalah untuk menjaga semangat nasionalisme warga negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap bela negara. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan kesadaran bela negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menunjukan upaya bela negara yang begitu heroik. Kumandang Resolusi Jihad pasca proklamasi oleh KH Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945 telah memompa nilai bela negara bagi segenap bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan.

2. Dasar Bela Negara

Dalam kamus *Mu'jam al-Wasith* (2011: 1085), istilah negara atau tanah air disebut dengan kata: *al-Wathan, al-Balad* dan *al-Dar*. Kata *al*-Wathan tidak disebut di dalam al-Quran. Kata *al-Balad*, di dalam al-Quran disebut dalam bentuk mufrad (البلد) dan Jamaknya (البلاد). Demikian juga kata *al-Dar* disebut dalam bentuk mufrad (الدار) dan jamak (الديار).

Di dalam al-Quran, kata *al-Balad* disebut dalam bentuk mufrad (البلد) disebut 14 kali, yaitu: QS al-Baqarah: 126, QS al-A'raf: 57, 58, QS Ibrahim: 35, QS al-Nahl: 7, QS

al-Furqan: 49, QS al-Naml: 91, QS Saba': 15, QS Fathir: 9, QS al-Zukhruf: 11, QS Qaf: 11, QS al-Balad: 1, 2, 3. Sedangkan dalam bentuk Jamak (البلاد) disebut sebanyak 5 kali, yaitu: QS ali Imran: 196, QS Ghafir: 4, QS Qaf: 36, QS al-Fajr: 8, 11.

Negara sebagai tempat tinggal disebut dengan الدار (mufrod) sekurang-kurangnya disebut 31 kali, yaitu: QS al-Baqarah: 94, QS al-An'am: 32, 127, 135, QS al-A'raf: 78, 91, 145, 169, QS Yunus: 25, QS Hud: 65, QS Yusuf: 109, QS al-Ra'd: 22, 24, 25, 31, 42, QS Ibrahim: 28, QS al-Nahl: 30, QS al-Qashash: 37, 77, 81, 83, QS al-Ankabut: 37, 64, QS al-Ahzab: 29, QS Fathir: 35, QS Shad: 46, QS Ghafir: 39, 52, QS Fushshilat: 28, dan QS al-Hasyr: 9. Sedangkan disebut الديار (jama') sekurang-kurangnya disebut 17 kali, yaitu: QS al-Baqarah: 84, 85, 243, 246, QS Ali Imran: 195, QS al-Nisa': 66, QS al-Anfal: 47, QS Hud: 67, 94, QS al-Isra': 5, QS al-Hajj: 40, QS al-Ahzab: 27, QS al-Hasyr: 2, 8, QS al-Mumtahanah: 8, 9, QS Nuh: 26.

Sebagai contoh, firman Allah Swt.:

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن **دِيَارِكُمْ** أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak [pula] mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*," [QS. al-Mumtahanah: 8].

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: "*[Juga] bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka [karena] mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar*," [QS. al-Hasyr: 8].

Pada ayat pertama, agama tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada non-Muslim dan berlaku adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita karena agama kita atau tidak mengusir kita dari tanah air kita. Ketika memuji kaum Muhajirin Allah Swt. menyebutkan bahwa di antara perbuatan luhur mereka yang pantas untuk dihormati, di samping karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Adapun bahwa mereka terpaksa keluar dari tanah air mereka (Makkah) meski dengan berat hati demi mempertahankan agama. Ayat kedua menunjukkan bahwa berkorban dengan meninggalkan tanah air lebih berat daripada berkorban dengan meninggalkan harta. Hal ini juga yang mengangkat derajat kaum Anshar, di mana mereka berkenan menerima Islam masuk ke tanah air mereka dan menjamin keamanan Rasulullah Saw. beserta orang-orang yang bersama beliau.

Dalam sejarah para Nabi dan Rasul, mereka mencintai tanah airnya melebihi cinta mereka pada diri sendiri. Rasulullah Saw. sendiri telah memberikan contoh terbaik yakni ketika beliau pergi dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Beliau berpaling kepadanya dan menyatakan perasaannya, "*Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu*." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta

beliau kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan.[9]

Di dalam kitab "*al-Tahliyah wa al-Targhîb fî al-Tarbiyah wa al-Tahdzîb*" Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air (*al-wathan*) sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mengecap air dan menghirup udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Semua fasilitas tersebut membuat manusia menyerahkan jiwa, raga dan harta bendanya untuk mengabdi pada tanah airnya dengan mendatangkan kebaikan, mengembangkan perekonomian dan memajukannya.[10]

Di dalam diri manusia Allah Swt. menciptakan banyak insting dasar yang sangat penting bagi kehidupannya dalam menjalankan perannya sebagai khalifah yang dibebani tanggungjawab memakmurkan bumi. Karena sebab cinta itu, manusia berusaha membangun tanah airnya, memakmurkannya, membelanya, mengerahkan hal-hal berharga yang ia miliki demi kebebasannya, serta mencegah siapapun dari para musuh untuk menguasai dan mengeksploitasinya. Ali ibn Abi Thalib ra. memberikan isyarat, "*Negeri-negeri itu dibangun dengan cinta tanah air*."[11]

Islam sebagai agama kemanusiaan memberikan

[9] Tim Penulis Rumah Kitab, *Kumpulan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, Cet. 2* (Jakarta: Rumah Kitab, 2017). 25.
[10] Sayyid Muhammad, *Al-Tahliyah Wa Al-Targhîb Fi Al-Tarbiyah Wa Al-Tahdzîb* (Kediri: al-Ma'had al-Islami Lirboyo Kediri, n.d.). 37.
[11] Sayyid Ali Al-Fadhlullah, *Hubb Al-Wathan Min Al-Îmân* (Taheran, 1439). 1.

perhatian dan mengakui hubungan dan rasa cinta manusia kepada tanah airnya. Di dalam Islam, cinta tanah air bukan sebatas luapan emosi, tetapi merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Kesadaran ini menuntut semua warga negara untuk berpijak di atas prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Rasulullah Saw. di dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah laksana satu jasad atas yang lain. Mereka bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka, dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Dengan begitu maka tanah air menjadi benteng pelindung bagi seluruh warganya. Kalau kita melihat sejarah peradaban sepanjang zaman, kita akan menemukan contoh-contoh nyata mengenai realisasi makna kesetaraan di antara semua warga di dalam suatu negara. Oleh karena itu, kesetaraan adalah ajaran Islam yang dengannya negara menjadi kuat, semua warga kompak, dan setiap individu terjaga kehormatannya.

Grand Mufti Mesir, Syaikh Ali Jum'ah mengatakan bahwa cinta tanah air adalah fitrah kemanusiaan yang diakui oleh Islam dan merupakan dasar untuk membangun masyarakat. Dengan fitrahnya manusia telah membentuk cinta kepada tanah airnya dan perasaan untuk senantiasa membelanya. Dan ketika Islam datang tidak lantas memutus kecenderungan itu tetapi mengakui dan menyerukannya, serta menjadikannya sebagai cara untuk melakukan amal

kebajikan, perbuatan-perbuatan baik, dan memperkuat tali persaudaraan di antara putra-putri bangsa.

Beberapa nilai cinta tanah air yang terdapat dalam Alquran adalah: (1) nilai persatuan dan kesatuan, terdapat dalam Q.S. al-Anbiya': 92, Q.S. al-Hujurat: 13, Q.S. Ali Imron: 103, dan Q.S. al- Shaff: 4 (2) nilai rela berkorban, terdapat dalam Q.S. al-Anfal: 60, Q.S. Qashsas: 7, dan Q.S. al-Nisa': 135 (3) nilai kesetiaan, terdapat dalam Q.S. al-Nisa': 59, dan Q.S. Ali Imron: 103 (4) nilai taat terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Q.S. al-Nisa': 59, dan Q.S. al-Nisa': 135 (5) nilai toleransi antarumat beragama terdapat dalam Q.S. al-Mumtahanah: 8, dan Q.S. al-An'am: 108,. Beberapa nilai tersebut juga memiliki kaitan dan dasar hukum dalam Alquran dan hadis.[12]

3. Perlunya Bela Negara
   a. Tujuan umum pemberlakuan syari'at adalah memakmurkan kehidupan di bumi merupakan pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di Bumi (QS al-Baqarah: 30) agar tidak bermusuhan, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.
   b. Untuk bisa menjalankan syari'at dan ketaatan beragama yang menjadi tugas manusia sebagai hamba Allah untuk ibadah kepadaNya (QS al-Dzariyat: 56) memerlukan

[12] M. Alifudin Ikhsan, "NILAI - NILAI CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (December 12, 2017): 108–14, https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p108.

dukungan negara yang makmur dan damai, seperti dicontohkan Nabi Ibrahim selalu berdoa agar negaranya aman dan rizki melimpah (QS al-Baqarah: 124, QS Ibrahim: 35).

c. Agar manusia bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan Akhirat yang menjadi tujuan hidup manusia (QS al-Baqarah: 201) memerlukan kondisi negara yang mampu menjamin kelancaran aktivitas hidup untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrowi.
d. Sumpah Allah terhadap negara atau *al-balad* di dalam al-Quran (QS al-Balad: 1, QS al-Tin: 3) menunjukkan arti pentingnya negara bagi kehidupan manusia di dunia, baru kemudian diikuti ayat "sungguh Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk" (QS al-Tin: 4). Ini memiliki makna bahwa manusia berada dalam kondisi unggul didahului dengan situasi dan kondisi negara tempat dilahirkan, tumbuh dan berkembang bagi warganya secara baik.
e. Perlunya syukur terhadap negara/tanah air yang baik (QS al-A'raf: 58, QS Saba': 15), terlebih terhadap tanah kelahiran (QS al-Balad:2).
f. Taat kepada Pemerintah, pemimpin Negara mendapat posisi khusus yaitu sesudah taat kepada Allah dan Rasulnya (QS al-Nisa': 59, 83), larangan jangan merusak bumi (QS al-A'raf: 56, 85),
g. Betapa pentingnya negara yang merdeka, damai, dan aman bagi kehidupan dan peradaban manusia, maka para ulama NU memfatwakan: Cinta tanah air adalah bagian iman (حب الوطن منالايمان).

4. Indikator Bela Negara

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan RI no. 8 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan kesadaran bela negara bahwa Nilai dasar bela negara, terdiri atas: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideology negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara.

a. Cinta Tanah Air

Ada beberapa istilah Tanah air diantaranya yaitu *Al-Wathan, Al-Balad* dan *Dar*. Dalam kamus *Mu'jam al-Wasith* (2011:1085) disebutkan bahwa *Al-Wathan* berarti tempat tinggal seseorang, tempat dimana ia bertumbuh dan tempat dimana ia dilahirkan. *Al-Balad* mempunyai arti tempat yang dibatasi atau yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang, atau dinamakan dengan tempat yang luas yang ada di bumi ini. Sedangkan *dar* berarti tempat berkumpulnya bangunan dan halaman, tempat tinggal. Ketiga kata tersebut mempunyai makna yaitu tempat tinggal.

Al-Jurjani mendefinisikan tanah air dengan al-wathan al-ashli.

اَلْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ هُوَ مَوْلِدُ الرَّجُلِ وَالْبَلَدُ الَّذِي هُوَ فِيهِ

Artinya; *al-wathan al-ashli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.* (Ali Al-Jurjani, al-Ta'rifat, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H, hal. 327).

Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwathi (wafat 1127 H) dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan:

وفِي تَفسيرِ الآيةِ إشَارَةٌ إلَى أنَّ حُبَّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ كَثِيرًا: اَلْوَطَنَ الوَطَنَ، فَحَقَّقَ اللهُ سبحانه سُؤْلَهُ ..... قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه لَوْلاَ حُبُّ الوَطَنِ لَخَرُبَ بَلَدُ السُّوءِ فَبِحُبِّ الأَوْطَانِ عُمِّرَتْ البُلْدَانُ

Artinya: *Di dalam tafsirnya ayat (QS. Al-Qashash:85) terdapat*

suatu petunjuk atau isyarat bahwa "cinta tanah air sebagian dari iman". Rasulullah SAW (dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata; "tanah air, tanah air", kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Makkah)….. Sahabat Umar RA berkata; "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri". (Ismail Haqqi al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 6, hal. 441-442)

Dalam kitab *asas al-balaghah* karya Al-Zamakhsari menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang mencitai tanah airnya, negeri asalnya dan tempat tinggalnya. (Imarah, 1998:271).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2002:778) cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya (Nurmantyo, 2016:9).

Menurut Al-Buthy (2010: vii), Cinta dapat diartikan ke dalam tiga karakteristik yaitu apresiatif (*ta'dzim*), penuh

perhatian (*ihtimaman*) dan cinta (*mahabbah*). Secara spesifik, bahasa Arab menyebutnya dengan 6 istilah cinta seperti *'isyqun* (menjadi asyik*), hilm, gharam* (asmara), *wajd, syauq* dan *lahf*.

Berdasarkan pandangan Al Buthy di atas dapat penulis simpulkan bahwa cinta yang dimaksud disini adalah perasaan kasih, perhatian dan kepedulian yang ditujukan kepada seseorang untuk tanah airnya. Perasaan cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan tanah airnya.

Perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan setidaknya dengan (1) menjaga nama baik bangsa; (2) berjiwa dan berkpribadian; (3) bangga bertanah air dengan beragam suku budayanya; (4) tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa serta (5) setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku.

Menurut Suyadi sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud (2013:9) cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, politik dan sebagainya sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.

b. Kesadaran sebagai Anggota Bangsa dan Negara

Berdasarkan pada nilai urgensinya cinta tanah air bagi kehidupan dan kehormatan manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai bangsa, maka kesadaran sebagai anggota bangsa dan negara perlu komitmen kebangsaan dan kecintaan terhadap negara selalu melekat bagi setiap anak bangsa.

Krisis multidimensi yang berkepanjangan—

puncaknya tahun 1997-2000—merupakan pengalaman terpahit dalam krisis ekonomi, politik, dan hukum pasca kemerdekaan Indonesia. Krisis yang dapat diibaratkan negara-bangsa yang turbulensi (*chaos*) di mana banyak pengamat menyebutnya sebagai "*A Country in Despair*" suatu negara bangsa yang bukan sekedar dilterpa bencana, tetapi telah tenggelam dalam ketiadaan harapan yang mendalam.[13] Nasion adalah suatu jiwa, suatu azas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan yang oleh manusia-manusia yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nasion mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas: yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama". Suatu nasion tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografis, atau hal-hal lain yang sejenis. Kehadiran suatu nasion adalah suatu kesepakatan bersama yang seolah-olah terjadi setiap hari antara manusia-manusia yang bersama-sama mewujudkan nasion yang bersangkutan (Bachtiar, 2001: 33). Itulah yang kemudian melahirkan nasionalisme.

Nasionalisme pada tahap awal berhasil merekatkan penduduk yang heterogen menentang kolonialisme. Tetapi setelah proses dekolonisasi berlangsung terutama dalam *nation building*, perlu ada *revitalisasi* dan *redifinisi* nasionalisme yang makin kompleks tantangannya.

[13] Daniel Dhakidae, *Indonesia Dalam Krisis 1997-2002* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

Tjokrowinoto (1996: 42) berpendapat bahwa nasionalisme dapat memainkan dua peran pokok, yaitu; (1) sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas *parochial*, (2) sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal baik kekuasaan kolonial, penetrasi *transnational corporation, multinational corporation*, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya pengaruh globalisasi. Semuanya itu memerlukan elaborasi nasionalisme yang tidak hanya menekankan aspek idelogi-politik—bentuk nasionalisme romantik, kewarganegaraan, kebudayaan, perekonomian, etnik, maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Islam sebagai agama kemanusiaan memberikan perhatian dan mengakui hubungan dan rasa cinta manusia kepada tanah airnya. Di dalam Islam, cinta tanah air bukan sebatas luapan emosi, tetapi merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Kesadaran ini menuntut semua warga negara untuk berpijak di atas prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Rasulullah Saw. di dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lain. Mereka bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka, dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Dengan begitu maka tanah air menjadi benteng pelindung bagi seluruh warganya. Kalau kita melihat sejarah peradaban sepanjang zaman, kita akan menemukan contoh-contoh nyata mengenai realisasi makna kesetaraan di antara semua warga di dalam suatu negara. Oleh karena itu, kesetaraan adalah ajaran Islam

yang dengannya negara menjadi kuat, semua warga kompak, dan setiap individu terjaga kehormatannya.[14]

Tanah air terdiri dari tanah, rakyat, tatanan, sistem, nilai-nilai, dan kehendak kemanusiaan. Semua ini menjelma di dalam tanah yang membentuk tanah air. Dari tanah itulah kita diciptakan, kita hidup di atasnya dan dikubur di dalamnya sampai kita dibangkitkan kembali oleh Allah di Hari Kebangkitan. "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu [menjadi] manusia yang berkembang biak," [QS. al-Rum: 20]. Seorang patriotis sejati mengetahui nilai tanah airnya dan memposisikan kesetiaannya terhadapnya di atas kesetiaan terhadap yang lain. Baginya, membela tanah air bukan untuk gagah-gagahan, tetapi merupakan tugas besar yang harus dijalankannya. Membela tanah air dengan melawan para pengacau juga merupakan tugas suci yang tidak boleh ditinggalkan siapapun tanpa alasan yang kuat. ((Rumah Kitab, **ISLAM DAN CINTA TANAH AIR,** Mei 17, 2019/in Opini /*by* Roland Gunawan. https://rumahkitab.com/islam-dan-cinta-tanah-air/ halaman 2).

Sebagaimana telah disinggung, bahwa terminologi "*nasionalisme*" merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Konsep terwujudnya rasa kebangsaan di atas kedengarannya

[14] Roland Gunawan, "Islam Dan Cinta Tanah Air," 2019, https://rumahkitab.com/islam-dan-cinta-tanah-air/.

mudah dilakukan, namun dalam implementasinya tidaklah semudah itu. Persoalannya tidak cukup dengan kesadaran perjuangan yang menuntut keberanian semata, melainkan telah menjadi suatu tuntutan perubahan atau pergeseran nilai-nilai sosial budaya itu adalah perlunya ditegakkan kejujuran (*truthfulnes*s) dan keadilan (*justice*). Bahkan kejujuran dan keadilan-pun tidak cukup jika tanpa disertai dengan *transparansi* atau *keterbukaan*—tiga komponen ini menjadi penting terutama untuk memperoleh "*kepercayaan*" sebagai modal sosial atau *social capital* (Fukuyama, 2000: 8).

Jamaluddin (2015:16) mengatakan bahwa suatu bangsa terbentuk karena adanya unsur-unsur dan akar-akar sejarah yang membentuknya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran bahwa pengabdian tertinggi seorang manusia untuk bangsa dan negara disebut dengan nasionalisme.

Konsep kebangsaan memiliki beragam karakteristik dan kriteria di setiap negara, tergantung pada tradisi-tradisinya. Hal tersebut akan nampak pada bagaimana status kebangsaan akan dilekatkan pada individu-individu. Setidaknya kebangsaan akan didasarkan dua prinsip utama, yaitu berdasar pada azas keturunan (*ius sanguinis*) seperti di Indonesia tempo dahulu dan berdasar pada azas kelahiran (*ius soli*) seperti dianut di Amerika Serikat. Varian lain dari dua prinsip tersebut seperti melalui proses naturalisasi, pemberian suaka politik (*political Asylum*) sampai model undian (*lottery*).

Dalam azas keturunan (*ius sanguinis*) biasanya akan menimbulkan terbentuknya *ethnic nationalism* maupun *ethnocultural nationalism*, yang didasarkan atas mitos-mitos

mengenai kesamaan leluhur dan kepemilikan tanah air yang diwariskannya. Dengan demikian konsepsi ini akan mementingkan adanya bukti-bukti fisik keturunan, bahasa, dan keagamaan. Akhirnya visi ini akan membawa masyarakat yang kurang demokratis. Sedangkan dalam azas kelahiran (*ius soli*) akan mengarahkan pada penguatan *civic-nationalism* (Fieschi dan Varouxakis, 2001: 22; Harjanto, 2002: 88). Dalam *civic nationalism* sendiri terbangun di atas satu kontrak sosial. Untuk kepentingan bersama dalam lembaga-lembaga publik dan *way of life* mereka. Konsepsi ini dalam beberapa hal dapat mengakomodasi perbedaan etnis dan budaya sejauh negara mampu menjaga netralitasnya. Singkatnya model ini menawarkan visi "*community of equal citizens*", walaupun di satu sisi kadang menimbulkan belum tentu demokratis paratisipatif, apalagi mereka tercerabut dari *preseden dan akar historisnya* dan sangat tergantung kepada kesukarelaan individu, bahkan sering dikreasi sebagai mitos untuk kepentingan mayoritas dalam menyamarkan atau *camouflage* sambil melakukan subordinasi terhadap minoritas (Kymlicka, 2000: 51)

Faktor pembentuk identitas bersama menurut Ramlan Surbakti (1999:44-47): (1) *Primordial*, yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat untuk membentuk suatu negara atau bangsa. Primordial ini tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama tetapi juga melahirkan persepsi tentang negara yang dicita-citakan. (2) *Sakral*, yakni kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat. Faktor sakral ini ikut menyumbangkan terbentuknya sifat nasionalis dalam diri individu di dalam suatu negara. (3)

Tokoh, kepemimpinan dalam suatu komunitas dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk suatu negara atau bangsa. Sebab, pemimpin ini akan menjadi panutan masyarakat sebagai simbol persatuan dan kesatuan untuk membentuk komunitas baru yang lebih besar (4) *Sejarah*, Persepsi yang sama tentang asal-usul atau pengalaman masa lalu seperti kejayaan dan penderitaan juga dapat membentuk solidaritas yang tinggi (Surbakti, 1999:44—45).

c. Kesetiaan pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Bagi para ulama pesantren bahwa NKRI dan ideologi Pancasila sudah final. Bahkan mereka tidak ragu untuk mengatakan bahwa Pancasila selaras dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Komitmen kebangsaan dan kecintaan mereka terhadap Indonesia diperkuat oleh doktrin agama yang mengharuskan mereka untuk mencintai tanah air. Mereka berpegang teguh pada jargon agama yang menyebutkan, "Hubb al-wathan min al-îmân," bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. (Rumah Kitab, **ISLAM DAN CINTA TANAH AIR,** Mei 17, 2019/in Opini /*by* Roland Gunawan. https://rumahkitab.com/islam-dan-cinta-tanah-air/ halaman 12).

Namun dalam berbagai aktualisasi nilai-nilai yang kurang selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti telah diuraikan tersebut di atas dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel
Aktualisasi Nilai Kurang Sesuai dengan Nilai-nilai Ideologi Negara

No	Nilai-nilai	Tantangan	Aktualisasi pola pikir/perilaku
1	Sila I	Nilai spiritualitas keaga-maan versus nilai komunisme, sekularisme, fundamentalisme, dan animism	Wacana negara khilafah, Wacana negara sekuler, Agama KTP, Keimanan dalam ruang kosong, Toleransi searah Keberagamaan minus keberagaman
2	Sila II	Nilai kemanusiaan versus fundamentalisme dan sektarian	Bullying, persekusi, dan menghujat, Radikal, Keadilan dalam kotak , Dukungan kemanusiaan dalam rasa individu dan kelompok; Harga diri yang kurang berharga
3	*Sila III*	Nilai persatuan Indonesia versus hegemoni	Orientasi kepentingan pribadi dan

		komunitas, dan pesimisme	kelompok, Cinta etnik Analogi negara dengan agama
4	*Sila IV*	Nilai kerakyatan versus liberalism , dan hegemoni sektarian	Politik identitas, Politik irasional , Politik uang
5	*Sila V*	Nilai keadilan sosial versus kapitalisme, hedo-nisme, dan individualism.	Korupsi, Hedonis, Sarana umum yang pribadi , Plagiasi dan kurang etos kerja

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019. Tatar Bonar Silitonga, *Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara* Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 17 No.1 Tahun 2020 hal. 15 – 28.

Bagi bangsa Indonesia, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya tidak perlu diperdebatkan, karena substansinya dan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya selaras dengan nilai-nilai yang diperlukan bagi bangsa yang beragama, disamping Pancasila tersebut merupakan kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka wajar apabila kemudian Pancasila disepakati sebagai dasar negara adalah sudah final.

Pada sila I yakni Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai spiritualitas yang memang menjadi nilai yang paling dasar dari setiap ajaran agama. Oleh karena itu, setiap agama yang ada di Indonesia bisa menerima

nilai Ketuhanan ini. Hal ini menyadarkan bahwa agama merupakan fitrah setiap manusia (QS al-A'raf: 172 dan QS al-Rum: 30) yang menuntut pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dipeluknya sesuai agama yang menjadi keyakinan warga bangsa Indonesia. Nilai ini sekaligus menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Nilai sila I ini yang dalam agama Islam disebut Tauhid (QS al-Ihlas: 1-4) yang diringkas dalam kalimat Tauhid yaitu: *La ilaha illa Allah* (tiada Tuhan selain Allah). Sila I ini juga menuntut bangsa Indonesia memiliki hubungan dengan Allah (*hablun mina Allah*)

Sila II yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai kemanusiaan yang harus menjunjung tinggi dengan keadilan dan keberadaban, Artinya bahwa bangsa Indonesia akan memiliki derajat yang unggul apabila berorientasi pada terwujudnya rasa keadilan dan memiliki sifat beradab (QS al-Nisa': 58, QS al-Nahl: 90 dan QS al-Mumtahanah: 8). Beradab juga diharapkan menjadi karakter bangsa Indionesia selaras dengan syair imam Syauqi: "sesunnguhnya eksistensi suatu bangsa sangat tergantung pada akhlaknya, dan apabila bangsa sudah tidak memiliki akhlak, maka tidak layak disebut sebagai bangsa". Sila II ini juga mengandung maksud *hablum mina al-nas* (hubungan dengan sesame manusia). Artinya bahwa bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan sesama manusia.

Sila III yakni Persatuan Indonesia merupakan nilai persatuan sebagai satu bangsa Indonesia. Dalam hal ini bangsa Indonesia dituntut memiliki semangat *ukhuwah* (persaudaraan) antar sesama bangsa Indonesia, yang dikenal dengan *Ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan atas

dasar kebangsaan). Persaudaraan sesama bangsa Indonesia ini harus dijaga persatuannya baik dari ancaman/gangguan internal maupun eksternal agar tidak berpecah-belah (QS Ali Imran: 103), karena nenek moyang dan kita lahir, makan, minum, menghirup udara, beraktivitas hidup dan bertempat tinggal di Indonesia (QS al-Balad: 1-3) dan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, setelah didahului sumpah Allah terhadap kota yang aman (QS al-Tin: 3-4). Bahkan persaudaraan ini tidak hanya sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*) (QS Ali Imran: 103 dan QS al-Hujurat: 10), tetapi juga antara sesama manusia (*ukhuwah basyariah* (QS al-Hujurat: 13).

Sila IV yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawatan /perwakilan merupakan nilai kerakyatan dalam arti bahwa rakyat memiliki peran pokok dalam menjaga eksistensi dan kemajuan negara. Dalam hal ini pemimpin sebagai wakil rakyat memiliki peran penting, maka pemimpin atau pejabat negara harus mengutamakan kemaslahatan rakyat (تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة). Nilai kerakyatan pondasi yang sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan musyawarah (QS Ali Irman: 159 dan QS al-Syura: 38) dan dalam musyawarah diperlukan dengan hikmat atau kebijaksanaan (QS al-Nahl: 125).

Sila V yakni Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai kepedulian atas sesama dalam arti bahwa keadilan social menjadi tujuan berdirinya negara Indonesia. Disinilah perlunya pemimpin bangsa

untuk selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh bangsa, bahkan orang yang mempunyai kelebihan memiliki kontribusi untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan keadilan social tersebut (QS al-Nur: 22).

d. Kesiapan untuk Berkorban Demi Bangsa dan Negara.

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan RI no. 8 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan kesadaran bela negara bahwa rela berkorban merupakan sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keihlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban bagi bangsa dan negara merupakan sikap dan perilaku dimana seseorang membaktikan diri bagi pengabdian untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga tanpa paksaan, tanpa pamrih dan tanpa meminta imbalan bagi kepentingan umum bangsa dan negara, walaupun pengabdian itu menuntut pengorbanan diri.

Rela berkorban artinya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara, membantu dengan ikhlas tanpa pamrih, siap membela bangsa dan negara dari ancaman dengan tetap setia patuh pada janji dan aturan yang berlaku memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, serta memiliki jiwa patriotism yang mencerminkan sikap dan perilaku yang berani pantang menyerah serta mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Rela berkorban merupakan nilai bela negara yang juga harus terus menerus dibangun, merupakan kesinambungan perwujudan dari cinta tanah air,

kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan pada Pancasila sebagai ideology negara, yang akan memperkokoh kekuatan bangsa dan ketahanan nasional terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari pihak luar maupun dalam negeri.

Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi anak bangsa untuk berkorban demi bangsa dan negaranya. Orang-orang yang mencintai tanah airnya adalah penjaga sekaligus pembelanya, bukan orang-orang yang tidak peduli atau acuh tak acuh, atau orang-orang yang membantu musuh untuk kepentingan pribadi mereka. Islam memuliakan orang-orang yang mengorbankan darahnya demi membela tanah air dan menganggap mereka sebagai syuhada. Rasulullah Saw. bersabda, "*Orang yang gugur karena membela tanahnya, maka ia mati syahid*." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla murka kepada seorang laki-laki yang rumahnya dikacaukan tetapi ia tidak melawan*."

e. Kemampuan Awal dalam Bela Negara

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan RI no. 8 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan kesadaran bela negara bahwa kemampuan awal bela negara adalah kemampuan yang mengandung semangat tinggi untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kemampuan yang sarat nilai karakter yang terkandung dalam semangat setiap warga negara yaitu: kesiapan diri dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan kecerdasan bertahan hidup atau mengatasi kesulitan, agar selalu siap bersaing secara sportif, memiliki motivasi untuk senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga,

berpikiran positif disetai hati yang riang gembira, memiliki keuletan dan semangat pantang menyerah, secara terus menerus membina kemampuan jasmani dan rohani secara konsisten, serta memiliki kemampuan fisik untuk bela negara melalui keterampilan berolahraga.

Kemampuan awal bela negara merupakan perpaduan 2 bentuk kemampuan yaitu: kemampuan psikis (mental) dan kemampuan fisik (jasmani) Kemampuan psikis, antara lain: memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet, percaya diri, tahan uji dan pantang menyerah. Sedangkan kemampuan fisik, antara lain: memiliki kesehatan yang baik, tangkas, dan lain-lain.

Kemampuan awal bela negara ini merupakan penyempurna perwujudan 4 indikator bela negara sebelumnya, yang harus dijaga diperkuat secara berkesinambungan dalam rangka menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, keutuhan dan kesinambungan hidup bangsa dan NKRI.

Pada Peraturan Menteri Pertahanan RI I no. 8 tahun 2022 tentang PKBN bahwa untuk pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas: pedoman PKBN lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan.

Pada lingkup pendidikan, pedoman PKBN digunakan sebagai acuan untuk:

a. Pengintegrasian PKBN dalam system pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Ini dilakukan pada kompetensi, materi, implementasi dan penilaian. Kompetensi PKBN, meliputi 5 nilai dasar bela negara, materinya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan, mulai: pendidikan anak usia didni (PAUD),

SD/MI/sederajat,SMP/MTs?sederajat, SMA/MA/SMK/MAK/sederajat, dan sampai perguruan tinggi. Implementasinya dilakukan melalui: intrakurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler dan budaya sekolah. Sedangkan penilaian dilakukan dengan menggunakan teknik dan instrument penialain yang sesuai untuk mengukur kompetensi.

b. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, terdiri atas: cara, materi, waktu, narasumber dan peserta.

Pada lingkup masyarakat, pedoman PKBN digunakan untuk:

h. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, terdiri atas: cara, materi, waktu, narasumber dan peserta.
i. Pelaksanaan diklat, paling sedikit memuat: materi, waktu, narasumber dan peserta.

Pada lingkup pekerjaan, pedoman PKBN meliputi:

a. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, terdiri atas: cara, materi, waktu, narasumber dan peserta;
b. Pelaksanaan diklat, terdiri atas: diklat PKBN dan diklat yang terintegrasi dengan pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan peletihan kepemimpinan atau pendidikan dan pelatihan lain. Pelaksanaan diklat, paling sedikit memuat: materi, waktu, narasumber dan peserta.

Selanjutnya pada lampiran II Peraturan Menteri Pertahanan RI I no. 8 tahun 2022 tentang PKBN bahwa PKBN di lingkup masyarakat merupakan upaya menanamkan dan memperkuat nilai dasar Bela Negara melalui: (1) integrase/intervensi ke dalam system nilai organisasi dan komunitas masyarakat serta system nilai

pada rancangan media massa, (2) pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh para tokoh melalui pembentukan budaya organisasi, serta (3) pembiasaan dan pemberdayaan warga di rumah dan di tengah masyarakat, membentuk budaya masyarakat yang sarat akan sikap dan perilaku nyata Bela Negara.

f. Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi

Perubahan nilai-nilai dan peran institusi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak dipengaruhi oleh fenomena globalisasi dan migrasi. Kurangnya peran dari institusi-institusi tradisional tersebut menyebabkan mahasiswa dan pelajar lebih rentan terpapar dan direkrut oleh kelompok-kelompok eksklusif.

Kelompok ekstremis memiliki target yang khusus terhadap generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar, untuk mengajarkan doktrin-doktrin mereka. Mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas di kampus seperti masjid dan musala sebagai tempat untuk merekrut dan mengindoktrinasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menyebabkan penyebaran kelompok intoleran yang semakin luas dengan gerakan yang terorganisir, sistematis, dan masif.

Perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka bagi mahasiswa harus mampu membentengi diri dari gerakan-gerakan yang mengarah pada upaya kaderisasi dan indoktrinisasi terhadap paham radikal. Pada posisi ini peran pimpinan perguruan tinggi menjadi penting, harus ada kebijakan yang menyeluruh dalam memperkuat toleransi, moderasi bergama dan bela negara. Misalnya memperkuat kurikulum pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan utamanya pendidikan

agama agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan yang toleran, moderat dan bela negara.

Namun dalam kenyataannya, terjadi radikalisme, dengan indicator, antara lain: (1) faham atau sikap anti Pancasila dan pro ideologi khilafah internasional, (2) faham / sikap takfiri, mengkafirkan pihak lain yang berbeda faham, (3) sikap anti pemerintahan yang sah, (4) sikap eksklusif terhadap lingkungan, dan (5) pandangan anti budaya atau kearifan local (Brigjen Ahmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan BNPT, ditulis Indra Gunawan, dalam Bisnis.com, 07 Maret 2022, diunduh 22 Desember 2023).

Setara Institute mencatat pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah terpapar paham radikalisme, di mana semuanya notabene merupakan Perguruan Tinggi dengan nama-nama besar (Strata Institut:2021). Kondisi ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi di Perguruan Tinggi lain yang jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi (PPDIKTI) tahun 2019 jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.621 dengan pembagian 3.129 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 122 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 1.192 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan 178 Perguruan Tinggi Kementerian (PTK) (PDikti: 2021). Di sinilah tantangan yang sesungguhnya bagi negara untuk mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar menjadi garda terdepan penguatan moderasi beragama dan bela negara.

Sementara itu, penyebab munculnya radikalisme, antara lain: (1) Faktor pemikiran, bahwa Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala

sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. (2) Faktor ekonomi, bahwa Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi. Karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. (3) Faktor politik, bahwa Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya mempehatikan segelintir kelompok saja. (4) Faktor social, bahwa Radikalisme dapat disebarkan dengan memengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. (5) Faktor psikologis, bahwa Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam. Sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi orang lain. (6) Faktor pendidikan, bahwa Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran.

Dari 6 faktor tersebut, yang paling menonjol pada akhir-akhir ini adalah 3 faktor, yaitu: pemahaman yang tidak komprehensif, politik identitas dan rendahnya literasi digital.

a. Pemahaman Agama tidak konprehensif

Kelompok ekstremis memiliki keinginan untuk

mengubah tatanan sosial politik dengan menggunakan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari ancaman, teror, hingga kekerasan fisik, demi mencapai tujuan mereka. Kejadian-kejadian kekerasan seperti ancaman pemenggalan, serangan terhadap kelompok minoritas, konflik agama, perusakan rumah dan tempat ibadah, serta serangan bom bunuh diri yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan adanya masalah serius terkait intoleransi dan ekstremisme di negara ini.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Wahid Institute pada tahun 2019, ditemukan bahwa sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 Warga Negara Indonesia (WNI) pernah terlibat dalam tindakan radikal. Data ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa sekitar 150 juta jiwa. Selain itu, sekitar 7,1% atau sekitar 11,4 juta jiwa diidentifikasi sebagai kelompok yang rentan terpengaruh gerakan radikal, artinya mereka berpotensi terlibat dalam gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan. Tidak hanya itu, sikap intoleransi di Indonesia juga mengalami peningkatan dari sekitar 46% menjadi 54% sebelumnya.

Global Terrorism Index (GTI) mencatat Indonesia pada tahun 2021 berada pada urutan ke 24 dari 162 Negara. Artinya Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan ancaman terorisme cukup tinggi.Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib (BNN : 2021) mengatakan mahasiswa adalah pihak yang sangat rentan terpapar radikalisme atau paham radikal. Namun, paham tersebut juga berpotensi dapat menjangkiti semua kalangan.

Hal tersebut terjadi, karena rata-rata mahasiswa

masih dalam taraf mencari paradigma baru dalam memahami agama, sementara kurikulum di perguruan tinggi khususnya negeri, kurang mencukupi untuk memenuhi keingintahuan mereka. "Misalnya masih sangat sangat basic dogmatic, misalnya soal iman. Tetapi hal-hal yang kekinian misalnya perlukah kita mendirikan khilafah, bagaimana sebenarnya sejarah khilafah secara historic, itu tidak dapat di perguruan tinggi negeri itu,"

Oleh karena itu, lanjutnya, banyak mahasiswa yang mencari jawabannya di luar kampus atau kalaupun di dalam kampus biasanya melalui jalur informal, seperti alumni atau orang luar kampus buat kajian di dalam kampus. "Tetapi ini justru mengarah ke idiologi tertentu, dalam hal ini ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria -red), al-Qaeda dan lain sebagainya," tambahnya.

Sebagai sebuah peluang, pengetahuan mengenai topik seperti khilafah dan hukum Islam terkait serangan bom bunuh diri sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum pada semester awal. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak mencari informasi tersebut di luar lingkungan kampus atau mendapatkan sumbernya melalui platform media sosial seperti YouTube dan Telegram channel, atau bahkan melalui pengajian di luar kampus yang mungkin mendorong pemahaman Islam yang tidak ramah namun cenderung radikal.

Ketersedian dosen Pendidikan agama islam pada pergurun tinggi umum masih terbilang belum sesuai antara kebutuhan kelas, belum juga data dari PDikti terkait linieritas dosen pengajar PAI di PTU, ini

mengakibatkan terkait mulfi tafsir beragama dan praktik beragama.

Pemahaman agama yang tidak komprehensif sangat memungkinkan sikap radikal, maka Islam telah mengajarkan umatnya untuk semua komunitas itu berperang, tetapi harus kelompok yang belajar ilmu atau belajar agama (*tafaqquh fi al-din*) (QS al-Taubah: 122). Bahkan dipertegas dengan hadits Nabi saw: *barangsiapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah hidayah kebaikannya, maka hakikatnya dia tidak bertambah ilmunya, melainkan semakin jauh dari Tuhannya* (al-Hadits). Dipertegas lagi dengan kaidah: *apabila ilmu seseorang semakin luas, maka luaslah (lapanglah) hatinya dan kecil kebenciannya pada orang lain*.

b. Politik Identitas

Toleransi tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga terkait dengan aspek sosial dan politik. Perkembangan politik identitas sejak pilkada DKI tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019 telah menyebabkan polarisasi masyarakat. Polaritas dalam masyarakat sering disertai dengan penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang berdasarkan SARA. Ujaran kebencian digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi, terutama terhadap ideologi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Penolakan tersebut berlanjut dengan usaha memaksakan perubahan menuju tatanan yang berbeda karena menganggap ideologi yang mereka yakini lebih unggul. Ujaran kebencian ini telah masuk ke dalam ranah politik praktis, yang membuat polarisasi dalam masyarakat semakin memprihatinkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) pada tahun 2010, sebagian besar muslim yang terpapar oleh berbagai informasi keislaman di berbagai media cenderung menganggap Islam sebagai bagian dari ekspresi etika dan budaya, sedangkan sebagian lainnya ingin Islam lebih terlibat dalam ranah politik. Namun, di kalangan mereka yang tergolong sebagai islamis, hanya sedikit yang benar-benar aktif mendukung ideologi politik Islam. Ada kemungkinan sekitar 20% dari populasi muslim di Indonesia yang mendukung praktik identitas politik Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Leli Salman Alf-Farisi:2018).

Menurut Burhanuddin Muhtadi, fenomena politik identitas yang dikemas dalam populisme Islam, jika dikuasai oleh pemimpin dan politisi yang tidak berani melawan arus, populisme tersebut akan berubah menjadi "racun" yang secara perlahan tapi pasti merusak demokrasi. Populisme tersebut tidak lagi menjadi obat bagi demokrasi yang selama ini menjadi ilusi bagi mereka yang tidak memahami bahaya dan ancaman politik identitas terhadap keberlangsungan dan integritas bangsa dan Negara Indonesia.

Beberapa bahaya politik identitas jika diterapkan di Indonesia adalah:

1) Mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2) Menimbulkan adu domba/perpecahan
3) Ancaman terhadap pluralism
4) Menimbulkan Polarisasi dan Pragmentasi kekuatan politik

5) Membawa Perselisihan/konflik

Praktik politik identitas dikalangan mahasiswa terjadi pada penyebaran organisasi kemahasiswa intra maupun ekstra yang terafiliasi dengan senioritas dan idiologi, hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah pemicu konflik, data yang dilangsir oleh Fisipol Unhas tahun 2021, membuktikan awal tahaun 2021 di makassar konfilk antara sebut saja Unismuh, UNM, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dll.

Politik identitas bisa menjadi sebab munculnya sikap radikalisme. Hal ini perlunya politik dikembalikan pada tujuan mulianya yaitu: *usaha memperbaiki manusia menuju jalan yang lurus yang memberi keselamatan dunia dan akhirat*. (Al-Ghazali< Ihya' Juz II). Politik identitas bisa diminimalisir dengan tujuan kerasulan Muhammad saw adalah sebagai rahmatan lil alamin (QS al-Anbiya': 107), misi Nabi saw bagi semua mannusia (QS Saba': 28) pada hal politik identitas ini dilarang, karena bisa memecah belah agama dan masing-masing golongan mengunggulkan atau membanggakan golongannya (QS al-Rum: 32 dan QS al-Mukminun: 53).

c. Rendahnya Literasi Digital

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dalam era revolusi industri digital 4.0, jika tidak diimbangi dengan literasi yang baik, dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan sosial. Penggunaan gadget, media sosial, dan budaya instan yang semakin meningkat, terutama di kalangan milenial, dapat

memperkuat perilaku eksklusivisme dan intoleransi.

Kelompok eksklusif dan intoleran seringkali memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan penafsiran agama mereka. Mereka menggunakan metode dakwah yang menarik sehingga menarik perhatian masyarakat, terutama milenial. Budaya instan dalam masyarakat menyebabkan mereka cenderung mencari informasi dan belajar agama melalui media sosial dan internet, sehingga lebih mudah terpapar dengan paham radikalisme, terutama ketika minimnya counter narasi dari kelompok moderat.

Konten-konten pemahaman agama yang bersifat radikal menjadi mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Penjelasan yang objektif tentang penafsiran agama seringkali kalah dalam persaingan dengan pilihan-pilihan subyektif yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak memiliki otoritas di internet dan media sosial.

Kondisi media sosial yang telah banyak dikuasai oleh kelompok radikal dan kelompok intoleran perlu di sikapi dengan serius. Pemerintah perlu melakukan kerjasama multipihak dengan Media Massa, Organisasi Masyarakat Keagamaan, dan Perguruan tinggi untuk memperbanyak konten konten Toleransi dan Moderasi beragama di Media Sosial.

Wacana toleransi dan moderasi beragama dan bela negara perlu secara terus menerus dibicarakan, utamanya di Media Sosial. Ketika konten-konten toleransi dan moderasi beragama membanjiri media sosial, nihcahya konten-konten intoleransi dan

radikalisme akan perlahan tenggelam dan hilang. Kemenfokom RI sebenanrnya sudah mensosialisasikan panduan literasi digital, yang mencakup: Cakap digital, Aman digital, Budaya digital dan etika digital.

BAB II
GRIYA MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

Sebagai bangsa Indonesia, kita telah mengenal moderasi beragama dan bela negara sejak lama. Keduanya merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila ketiga tentang Persatuan Indonesia. Namun, saat ini keduanya mendapat tantangan dari muncul dan berkembangnya aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang ingin menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi Negara. Untuk itu, kita perlu memperkuat moderasi beragama dan bela negara sebagai cara untuk menangkal segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sudah ada lembaga yang bertugas sebagai pelaksana moderasi beragama, yaitu Rumah Moderasi Beragama, namun, di Perguruan Tinggi Umum (PTU) atau perguruan tinggi non-PTKI, lembaga seperti itu belum ada. Moderasi beragama hanya dilakukan secara terbatas melalui pengajaran pada mata kuliah agama. Sementara itu, bela negara diajarkan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Kondisi ini tentu tidak ideal, sehingga perlu dicari solusinya, yaitu dengan membentuk, mengadopsi, atau merekonstruksi konsep rumah moderasi beragama yang ada di PTKI menjadi "Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara" di PTU yang selanjutnya disingkat menjadi MBBN. Dengan adanya Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di PTU, diharapkan PTU dapat menjadi garda terdepan dalam upaya penguatan moderasi beragama dan bela negara di Indonesia bersama-sama dengan

PTKI. Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia meluncurkan GMBBN pada 29 November 2022 di Makara Art Center Universitas Indonesia Depok dan dihadiri sembilan Perguruan Tinggi Umum sebagai pilot project MBBN. 9 PTU tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM),Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Nusantara (UNINUS), dan Universitas Garut (UNIGA) .

A. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum

1. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Indonesia

   Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di UI didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mempromosikan sikap moderat di kalangan mahasiswa. Latar belakang pendirian griya ini melibatkan perhatian terhadap isu-isu keagamaan, nasionalisme, serta keamanan nasional yang merupakan bagian integral dari misi pendidikan tinggi.

   Selain semangat tersebut juga dilatar belakangi oleh hasil rilis dari BNPT pada tahun 2018 terkait indek paham radikalisme pada Perguruan tinggi yang memposisikan UI sebagai kampus terpapar faham radikalisme[15].

   Munculnya faham radikalisme di lingkungan

[15] Baca hasil penelitian indek paham radikalisme oleh BNPT yanh salah satu hasilya 39% mahasiswa di 7 PT Negeri terpapar paham radikalisme (BNPT, 2018).

kampus, termasuk di Universitas Indonesia (UI), bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks. Perlu diingat bahwa faham radikalisme tidak muncul secara seragam, dan faktor-faktor berikut dapat berinteraksi secara kompleks dalam membentuk pandangan atau perilaku radikal di kalangan mahasiswa.

Pembentukan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di PTU dapat mendorong PTU menjadi gerbong terdepan dalam upaya penguatan moderasi beragama dan bela negara di Indonesia bersama-sama dengan PTKI. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara diarahkan untuk melakukan 3 (tiga) agenda utama. Pertama, Pendidikan dan Pelatihan. Kedua. Kajian, penelitian dan Publikasi, dan Ketiga, Advokasi dan pendampingan masyarakat.

Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di kampus Universitas Indonesai ini di launching pada Senin 28 November Tahun 2022 yang diketuai oleh Muhammad Solechan sekaligus sebagai coordinator dosen pai pada UI, pendirian Griya merujuk pada edaran dirjen Nomor: B-1082/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/11/2022.

Program moderasi beragama bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, toleransi, dan dialog antarumat beragama. Beberapa program unggulan moderasi beragama yang dapat diimplementasikan di berbagai lembaga, termasuk di kampus, meliputi:

a. Diskusi Interfaith: Menyelenggarakan serangkaian diskusi dan forum antarumat beragama untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan kepercayaan dan menciptakan dialog yang konstruktif.

b. Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara: Mengadakan program pelatihan untuk mengembangkan kepemimpinan mahasiswa dan kesadaran terhadap tanggung jawab bela negara.
c. Proyek Pelayanan Masyarakat: Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat yang mendukung pembangunan lokal dan nasional.
d. Pembinaan Karakter: Menyelenggarakan kegiatan dan seminar yang mendukung pengembangan karakter mahasiswa, termasuk nilai-nilai moderasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

2. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Gajah Mada

UGM merupakan salah satu dari sembilan Perguruan Tinggi Umum yang terpilih sebagai pilot project MBBN oleh Kemenag, merespon hal tersebut, Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.,Ed.,Sp.OG (K), Ph.D., segera membentuk pengurus Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dan melantiknya pada hari Rabu, 28 Desember 2022 di Fakultas Filsafat UGM. Lembaga ini bertugas untuk memperkokoh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam keragaman dan memperkuat persatuan antar umat beragama di kalangan civitas akademika Universitas Gadjah Mada.

Rektor juga sempat menyinggung bahwa sekarang ini lembaga perguruan tinggi masih menjadi ladang subur masuknya paham radikal yang bisa merusak moral dan karakter para civitas akademika terutama di kalangan

mahasiswa. Ia mengutip hasil laporan dari Kemendikbud Ristek yang menyebutkan UGM termasuk dalam salah satu 10 perguruan tinggi di Indonesia yang terpapar radikalisme "Ada sepuluh perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme menjadi sesuatu yang perlu kita sikapi bersama".

Dekan Filsafat UGM, Dr. Siti Murtiningsih, menuturkan moderasi beragama sangat diperlukan di kalangan civitas akademika untuk memastikan hak individu memeluk agama menjadi tidak terganggu. Sebab, salah satu prinsip dasar demokrasi dan HAM, hak setiap warga negara untuk dihargai dan dilindungi dalam beragama. Adanya pengelola Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di kampus yang diamanatkan pada Fakultas Filsafat UGM adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak warganya dalam beragama dan meningkatkan toleransi dalam keberagaman.

Sedangkan pengelola Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) UGM ini dipimpin oleh Syarif Hidayatullah MA., Dr. Iva Ariani sebagai Sekretaris dan Dr. Hastanti Widy Nugroho selaku Bendahara. Sedangkan anggota Dewan Pakar terdiri atas Prof. Lasiyo, Prof. Armaidy Armawi dan Agus Wahyudi, Ph.D.

Program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universita Gajah Mada, diantaranya melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan bela negara bagi mahasiswa, dosen, dan staf UGM
b. Penelitian dan pengembangan moderasi beragama dan bela negara di Indonesia
c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang moderasi beragama dan bela negara.

d. Ditunjuknya Fakultas Filsafat sebagai sentral pemahaman ideologi dan karakter.
e. Integrasi muatan Moderasi Beragama dalam mata kuliah PAI
f. Integrasi muatan Moderasi Beragama dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.
g. Studium General dengan Mendatangkan tokoh dari BNPT dan korban/mantan teroris untuk pencegahan pemahaman radikal.
h. Masjid Kampus Sebagai benteng pemahaman ideologi salah satunya melalui isi khutbah.

3. Griya Moderasi Beragama dan Bela Universitas Negeri Surabaya

Diantara sembilan Perguruan Tinggi Umum yang terpilih sebagai pilot project MBBN oleh Kemenag adalah Universitas Negeri Surabaya (UNESA). UNESA terpilih karena memiliki komitmen dan kinerja yang baik dalam mengembangkan moderasi beragama dan bela negara di lingkungan kampus. UNESA juga memiliki potensi dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan program MBBN dengan efektif dan efisien.

Merespon penunjukan dari Kemenag RI, UNESA memberi mandaf kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) sebagai koordinator dan pelaksana program MBBN di kampus. FISH memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan tema dan tujuan program MBBN. FISH juga memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk mendukung program MBBN. FISH telah membentuk tim ahli yang terdiri dari dosen-dosen yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang moderasi beragama dan bela negara. Selanjutnya, secara resmi Griya MBBN di

UNESA diluncurkan pada hari Rabu, 14 Desember 2022, di Auditorium, Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH).

Program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melalui Subdit Ideologi, Moderasi Beragama, dan Bela Negara (IMBN) Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis UNESA melalui beberapa Program Kerja sebagaimana berikut:

a. Sekolah dan Kampanye Online dan Offline Pancasila, Moderasi Beragama dan Bela Negara
b. Seminar dan Kompetisi Konten Kreatif Bertema Ideologi Pancasila, Moderasi Beragama dan Bela Negara
c. Penyusunan karya buku bertema ideologi dan MBBN
d. Interfaith Camp dan Kebangsaan
e. Kajian Isu Strategis IMBBN di Fakultas-fakultas
f. Survey dan Pemetaan Potensi Kerawanan IMBBN

4. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Malang

Universitas Negeri Malang bukanlah Perguruan tinggi keagamaan, namun agama mengambil peran dan posisi penting dalam kehidupan kampus di Universitas Negeri Malang. Inilah cara Universitas Negeri Malang untuk merawat berbagai perbedaan dalam kehidupan kampus diantaranya dengan mendirikan Griya moderasi beragama dan bela negara serta mengenalkan pergerakan mahasiswa moderasi beragama dan bela negara.

Sudah Selayaknya nilai-nilai cinta tanah air bela negara dengan ditopang semangat keberagaman perlu dijaga dan ditumbuh dikembangkan pada ekosistem Pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga

perguruan tinggi dalam kaitan tersebut yang juga bersama dengan para tokoh lintas Agama kota Malang memberikan dukungannya untuk *Launching* Griya moderasi beragama dan bela negara serta pergerakan mahasiswa moderasi beragama dan bela negara dalam melakukan penguatan nilai-nilai moderasi beragama di berbagai program dan kebijakannya.

Keberadaan Griya MBBN ini sangat penting dan strategis untuk mengarus utamakan pemahaman sikap dan perilaku beragama yang toleran, inklusif dan moderat sekaligus menguatkan karakter cinta tanah air dan bela negara, khususnya civitas Akademika Universitas Negeri Malang, yang mengingat belakangan ini ada kecenderungan munculnya paham-paham keagamaan yang ekstrem dan radikal, sehingga hal ini akan dapat mengancam Harmoni masyarakat dan integrasi bangsa.

Program Kerja Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) dan Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) Universitas Negeri Malang, diantaranya adalah:

a. Forum Mahasiswa Lintas Agama

   Forum mahasiswa lintas agama adalah suatu wadah yang menghubungkan mahasiswa UM lintas agama melalui UKM keagamaan yang ada baik tingkat Universitas maupun Fakultas. Kedepan Forum ini akan menjadi wadah Edukasi dan Implementasi para mahasiswa akan nilai-nilai moderasi beragama dan bela negara pada kehidupan kampus.

   Adapun tujuan diadakannya forum ini adalah untuk mempererat kerukunan dan toleransi antar mahasiswa lintas agama guna menekan paham-paham

radikal yang fanatik dari agama yang ada pada kehidupan kampus. Yang menjadi kebutuhan dari forum ini adalah Surat menyurat, anggaran untuk konsumsi setiap pertemuan, dan tempat untuk pertemuan.

b. Pengaktifaan Media Informasi

Pengaktifan media informasi merupakan program kerja dengan mengaktifkan media sosial seperti: Instagram atau *website* dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai GMMBN dan PMMBN serta mendokumentasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya.

c. Sekolah Moderasi Beragama dan Bela Negara

Sekolah moderasi beragama dan bela negara merupakan kegiatan dimana akan dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Pada setiap pertemuan akan membahas mengenai tema yang berbeda namun saling keterkaitan. Pada pertemuan pertama akan membahas mengenai Moderasi Beragama, pertemuan kedua membahas Bela Negara, dan pertemuan ketiga membahas mengenai Implementasi Moderasi Beragam dan Bela Negara di lingkungan Kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang benar, seimbang, dan fungsional serta mewujudkan konsepsi bela negara yang benar di lingkungan universitas. Target peserta pada kegiatan ini yaitu mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika UM.

d. Pembuatan Campign Moderasi Beragama dan Bela Negara

Pembuatan campaign merupakan program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan moderasi

beragama & bela negara sehingga kesadaran civitas terhadap hal tersebut meningkat. Campaign akan disebar secara offline dengan menaruh disetiap fakultas ataupun online dengan media sosial yang dimiliki. Sasaranya adalah Seluruh civitas akademika Universitas Negeri Malang.

e. Refleksi Kebangsaan Akhir Tahun

Refleksi Kebangsaan akhir tahun adalah kegiatan rutin yang diadakan di Universitas Negeri Malang dengan tujuan untuk merefleksikan aktivitas kehidupan di lingkungan kampus selama 1 tahun berlalu. Kegiatan ini tentunya untuk mengambiil hikmah perjalanan UM selama satu tahun untuk Indonesia.

f. Kunjungan Silaturahmi Rumah Ibadah Lintas Agama

Melaksanakan Kunjungan ke Rumah Ibadah Lintas Agama adalah program kerja yang diusung untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama khususnya di lingkungan kampus dengan mengenal rumah ibadah lintas agama. Adapun yang menjadi sasaran nya ialah seluruh stakeholder GMBBN & PMMBN UM (Pengelola griya, Pengelola PMMBN, Mahasiswa Lintas Agama, & PKBK UM).

g. Leadership and National Defense Program

Program tersebut adalah program pelatihan kepemimpinan dan penguatan nilai bela negara dalam diri setiap individu. Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya karakter individu yang memiliki sikap pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas serta cinta tanah air. Sasaran dari program ini yang utama adalah mahasiswa sebagai *agent of change*., seluruh civitas academica di kampus UM dan khalayak umum.

5. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Malang

Universitas Islam Malang (UNISMA) sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab mendidik dan membina mahasiswa menjadi ilmuwan yang mumpuni di bidangnya serta memiliki karakter moderasi dan bela negara. Upaya ini diwujudkan dengan mendirikan griya moderasi beragama dan bela negara. Lebih lanjut, UNISMA sebagai lembaga yang bercitra diri Islam di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, mempunyai tanggung jawab membentuk dan mendidik mahasiswa menjadi insan yang shaleh, berkepribadian, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyyah*. Dalam rangka menguatkan dan tanggung jawab Universitas Islam tersebut di atas, maka didirikanlah Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Malang.

Program Kerja Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Malang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, toleransi, dan dialog antar umat beragama. Beberapa program kerjanya meliputi:

a. Launching Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara

Launching Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara merupakan agenda yang sedang di gencarkan oleh Kementrian Agama khususnya pada bidang Pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Ada 9 perguruan tinggi umum yang menjadi inisiator griya moderasi bergama dan bela negara dari PTU seluruh Indonesia. Salah satunya yakni adalah Universitas Islam

Malang yang melaksanakan launching griya moderasi bergama dan bela negara yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Januari 2023 di Auditorium Kh Wahab Hasbulloh Universitas Islam Malang dengan mengusung tema "Meneguhkan Moderasi Beragama dan Bela Negara di Lingkungan Pendidikan Menuju Era Society 5.0".

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pendis Kemenag RI, Rektor UNISMA, Ketua Lakpesdam PCNU Malang, Pimpinan Pusat PMMBN, Pimpinan Wilayah PMMBN, Pimpinan Komisariat PMMBN dari berbagai kampus dan seluruh tamu undangan di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan ini menjadi bagian penguatan UNISMA, misi internalisasi nilai-nilai aswaja secara istiqomah. Penerapan nilai tawasuth atau moderat didalam beberapa perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi kekayaan besar indonesia dengan peningkatan multikultural dan pluralis. Disertai dengan deklarasi di UNISMA sebagai kampus pelopor anti radikalisme dan intoleran, Rektor Universitas Islam Malang.

b. Pelantikan Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara

Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum memiliki keistimewaan dalam mempelajari keilmuan, disatu sisi mahasiswa mempelajari ilmu umum sesuai bidangnya, disisi lain mereka juga mampu memahami ilmu agama dengan baik. Ini hal yang teristimewa, artinya bahwa disamping mahasiswa ini pandai ilmu pengetahuan umum tetapi juga tidak kalah untuk memahami tafaqquh fiddin tentang ilmu agama.

Pelantikan Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara dilaksanakan sebagai media Penguatan Moderasi Beragama Mahasiswa ini sekaligus mengukuhkan organisasi Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara yang merupakan embrio dari pembentukan duta Moderasi beragama dalam pelaksanaannya penguatan Moderasi Beragama mahasiswa ini juga melibatkan Dosen PAI PTU yang bertugas mendampingi mahasiswa.

Serta memberdayakan mahasiswa untuk memahami dan menghargai pluralitas, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

6. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Wahid Hasyim

Universitas Wahid Hasyim dalam meneguhkan nilai-nilai Moderasi beragama dan bela negara Hal ini dapat mencakup dukungan terhadap kebijakan pemerintah, partisipasi dalam pelatihan militer, dan kesediaan untuk berkontribusi pada pertahanan negara. Dalam konteks pendidikan tinggi, bela negara dapat tercermin dalam upaya untuk membentuk karakter mahasiswa yang patriotis, cinta tanah air, dan siap berkontribusi pada pembangunan negara.

Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Unwahas di SK kan oleh rektor dengan No.261/Kep.UWH/X/2022 yang di ketuai oleh Nur Rois, S.Pd.I., M.Pd.I , beberapa program kegiatan yang berkolaborasi dengan Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama (PMBBN) dan Bela Negara dan Pegiat Aswaja Muda Unwahas telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

a. Kuliah Moderasi Beragama dan Bela Negara

Kuliah Moderasi Beragama dan Bela Negara yang dipelopori oleh PMBBN ini bekerja sama dengan GMBBN, kegiatan ini dilaksanakan selama lima kali dengan Narasumber dan tema yang berbeda-beda. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengkuatkan dan memahami secara mendalam terkait Moderasi Beragama dan Bela Negara pada mahasiswa.

b. FGD Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara

Kegiatan ini merupakan Kerjasama GMBBN dengan Pegiat Aswaja Muda Unwahas, tujuannya memberi gambaran dan pemahaman para pegiat terkait Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Wahid Hasyim pada khususnya, dan Masyarakat pada umumnya.

c. Literasi Aswaja "*Reinforcing Social Identity*"

Tujuan kegiatan ini adalah ; 1. Membangun wacana mengenai aswaja dalam konteks pengautan identitas sosial 2. Perlunya desain strategis dalam membangun kolektifitas generasi muda NU 3. Mewujdukan pola humanis dalam konteks dakwah di Masyarakat.

d. Pembuatan Konten Moderasi Beragama melalui Pegiat Aswaja Muda

7. Griya Moderasi dan Bela Negara Universitas Pendidikan Indonesia

Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama dan bela negara di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bekerjasama dengan pihak Rektorat secara rutin akan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menghasilkan Kebijakan Universitas Pro Moderasi Beragama dan Bela Negara,

seperti:

a. Kebijakan yang memfasilitasi pendidikan agama bagi mahasiswa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
b. Kebijakan Masa Orientasi Kampus (MOKAKU) Berwawasan Bela Negara.
c. Pelatihan Penangkal Radikalisme bagi Mahasiswa
d. Dialog Rutin Antar Umat Beragama bagi Dosen dan Mahasiswa.

Melalui kebijakan yang dikembangkan ini akan terwujud kerukunan dalamkeberagaman yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, maka beberapa program yang di canangkan:

a. Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi

   Penyusunan program bidang kajian, penelitian, dan publikasi harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Griya Moderasi dan Bela Negara (GMBN) UPI. GMBN UPI memiliki dua visi: (1) meneguhkan spirit Agama *Rahmatan Lil 'Alamin*; (2) menjaga Keutuhan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua visi tersebut didukung oleh lima visi. Pertama, terselenggaranya diklat, workshop, dan *Training Of Trainer (ToT)* kader moderasi dan bela negara. Kedua, terbentuknya duta moderasi beragama dan bela negara di Universitas Pendidikan Indonesia. Ketiga, terselenggaranya penguatan dan penanaman moderasi beragama dan bela negara bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Universitas Pendidikan

Indonesia. Keempat, menanamkan rasa cinta tanah air, rela berkorban, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, GMBN UPI memiliki tujuan sebagai pelaksana Penguatan Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Pendidikan Indonesia.

Sebagaimana visi, misi, dan tujuan tersebut maka bidang kajian, penelitian, dan publikasi memiliki program sebagaimana tabel 1 dengan roadmap pada gambar 1.

Tabel 1
Konten Bidang Kajian, Penelitian, dan Publikasi

Bidang	**Sub Bidang**	**Konten Sub Bidang**
Kajian, Penelitian, dan Publikasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara	Kajian	1. Konflik dan kekerasan berlatar agama (Ekstrim Vigilante, Radikalisme, Terorisme) 2. Intoleransi dan eksklusivisme (Truth claim, Etnocentrik mono kulturalisme)
	Penelitian	1. Literasi Agama, Kebangsaan, Budaya berbasis digital

		2. Kaderisasi dan Indoktrinasi Paham Radikalisme Intoleran kepada Mahasiswa 3. Politik Identitas Bela Negara
	Publikasi	1. Publikasi hasil kajian dan penelitian melalui Web UPI, Kemenag 2. Publikasi melalui Buku

Gambar 1. Roadmap kajian, penelitian, dan publikasi

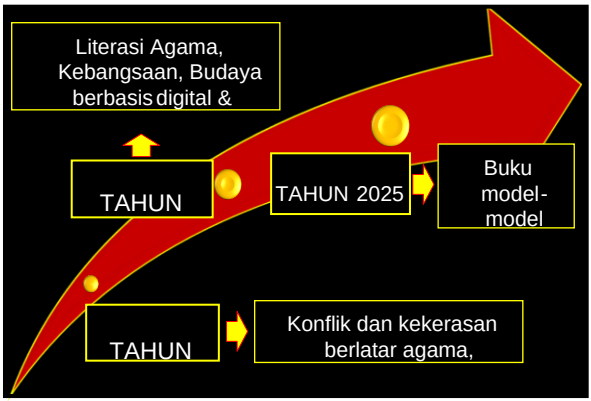

Berdasarkan roadmap tersebut, terdapat tiga jenis program pada Bidang Kajian, Penelitian, dan Publikasi yang ditawarkan, yaitu: Pengembangan Kompetensi Berbasis Keilmuan (PKBK), Infusi Perkuliahan untuk Moderasi Beragama dan Bela Negara (IP-MBBN), Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Umum (Ka-PTU), dan Kolaborasi dengan Pemerintah dan Perkumpulan/Organisasi Profesi (KP-OP).

a. Pengembangan Kompetensi Berbasis Keilmuan (PKBK)

   Kajian, penelitian, dan publikasi dalam jenis ini ditujukan untuk meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif antara dosen dengan mahasiswa dan memublikasikankepada

halayak yang akhirnya dijadikan sebagai ujung tombak pengokohan moderasi beragama dan bela negara.

b. Infusi Perkuliahan untuk Moderasi Agama dan Bela Negara (IP-MBBN)

   Kajian, penelitian, dan publikasi dalam jenis ini ditujukan untuk meningkatkanatmosfer akademik dalam perkuliahan terkait infusi media, model, lingkungan pembelajaran dan memublikasikan kepada halayak yang akhirnya mendukung percepatan pencapaian target moderasi beragama dan bela negara

c. Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Umum (Ka-PTU)

   Kajian, penelitian, dan publikasi dalam jenis ini ditujukan untuk meningkatkanatmosfer akademik dosen dan mahasiswa antar perguruan tinggi umum (PTU) untuk Pengembangan Kompetensi Berbasis Keilmuan (PKBK) maupun Infusisi Perkuliahan untuk Moderasi Beragama dan Bela Negara (IP-MBBN).

d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Perkumpulan/Organisasi Profesi (KP-OP)

   Kajian, penelitian, dan publikasi dalam jenis program ini ditujukan untuk meningkatkan atmosfer akademik dosen

dan mahasiswa dalam pengokohan MBBN dengan pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dan dengan Perkumpulan/ Organisasi Profesi.

b. Bidang Advokasi dan pendampingan masyarakat

Arah moderasi beragama dan bela negara di UPI dalam bidang advoksasi dan pendampingan masyarakat diarahkan pada:

a. Memprioritaskan pada advokasi non-litigasi yang menitik beratkan pada perubahankebijakan dan pemberdayaan. Layanan advokasi non litigasi meliputi namun tidak terbatas pada:
    1) Melakukan langkah persuasif terkait aspirasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat dalam rancangan kebijakan
    2) Melakukan langkah persuasif antar kementerian dan lembaga terkait kebijakan yang berdampak pada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat
    3) Melakukan mediasi moderasi beragama dan bela negara.
    4) Memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas berkaitan dengan pembelaan hak- hak sipil, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup Penghayat

Kepercayaan dan Masyarakat

b. Advokasi litigasi menjadi alternatif terakhir dan diberikan secara terbatas pada upaya hukum perdata dalam hal pihak tergugat atau turut tergugat bukan institusi Pemerintah/Negara setelah melalui proses penelaahan dan pemeriksaan mendalam atas kasus/persoalan yang diadukan.
c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Griya Moderasi dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara

Program Griya Moderasi dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara (UNINUS) diantaranya adalah:

a. Mendukung pelaksanaan tugas kementerian dalam mewujudkan moderasi beragama dan bela negara;
b. Menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi moderasi beragama dan bela negara;
c. Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi moderasi bergama dan bela negara kepada instansi pemerintah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat;
d. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan daerah;
e. Melakukan penguatan moderasi beragama dan bela negara melalui tridharma perguruan tinggi;

f. Melakukan pelatihan moderasi beragama dan bela negara kepada civitas akademika perguruan tinggi umum dan masyarakat;
g. Melakukan penelitian moderasi beragama dan bela negara;

9. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Garut

Program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universita Garut, maka Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universitas Garut melaksanakan hal-hal sebagai berikut

a. Diskusi dan Seminar: Mengadakan serangkaian diskusi dan seminar yang membahas nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan peran mahasiswa dalam bela negara. Menyertakan narasumber ahli dari berbagai latar belakang agama dan bidang keilmuan.
b. Pelatihan Keterampilan Dialog: Menyelenggarakan pelatihan untuk mahasiswa dan staf tentang keterampilan dialog, komunikasi efektif, dan pemahaman perbedaan agama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.
c. Kegiatan Keagamaan Bersama: Mengorganisir kegiatan keagamaan bersama, seperti doa bersama, upacara keagamaan yang melibatkan berbagai agama, dan kegiatan keagamaan kolaboratif untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.
d. Pengembangan Kurikulum: Mengintegrasikan moderasi beragama dan bela negara dalam kurikulum melalui mata kuliah khusus, seminar,

atau proyek penelitian yang mempromosikan pemahaman dan praktik moderasi beragama.

e. Program Pelayanan Masyarakat: Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat yang mendukung pembangunan lokal dan nasional serta menguatkan semangat bela negara.
f. Kunjungan ke Tempat Ibadah Berbeda: Merencanakan kunjungan mahasiswa ke tempat-tempat ibadah yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik keagamaan dan keberagaman budaya.
g. Pameran Kebudayaan dan Agama: Mengadakan pameran yang merayakan keberagaman kebudayaan dan agama di kampus, termasuk pameran seni, pertunjukan budaya, dan presentasi kuliner dari berbagai tradisi.
h. Pengembangan Materi Edukasi: Membuat materi edukasi dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh anggota kampus, seperti brosur, poster, dan sumber daya online yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan bela negara.
i. Konseling Agama dan Kebutuhan Spiritual: Menyediakan layanan konseling agama dan kebutuhan spiritual bagi mahasiswa untuk memberikan dukungan dalam menjalani perjalanan keagamaan mereka.
j. Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program-program moderasi beragama dan bela

negara serta menyesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi.

B. Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum

1. Implementasi moderasi beragama dan bela negara di Universitas Indonesia

   Implementasi moderasi beragama dan bela negara di Universitas Indonesia (UI) memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin diambil untuk mewujudkan moderasi beragama dan bela negara di UI:

   a. Pembentukan Lembaga atau Unit Khusus: UI dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga atau unit khusus yang bertanggung jawab atas program moderasi beragama dan bela negara. Lembaga ini dapat memiliki tugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program terkait.
   b. Penyusunan Kebijakan Institusional: Menyusun kebijakan institusional yang mendukung prinsip moderasi beragama dan bela negara. Kebijakan ini dapat mencakup komitmen untuk mendukung keberagaman, toleransi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara.
   c. Integrasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum: Memastikan bahwa konsep moderasi beragama dan bela negara diintegrasikan dalam kurikulum berbagai program studi. Hal ini dapat mencakup mata kuliah khusus, seminar, atau proyek penelitian

yang mempromosikan pemahaman dan praktik moderasi beragama.

d. Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop bagi dosen, staf administrasi, dan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama, bela negara, dan nilai-nilai kebangsaan.
e. Diskusi dan Seminar Rutin: Menyelenggarakan diskusi dan seminar rutin yang membahas isu-isu moderasi beragama, toleransi, dan bela negara. Ini dapat melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberikan pandangan yang beragam.
f. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Eksternal: Memperkuat kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas keagamaan untuk mendukung program-program moderasi beragama dan bela negara.
g. Pengembangan Materi Edukasi dan Informasi: Membuat materi edukasi dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh anggota kampus, termasuk materi online, brosur, dan poster yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan bela negara.
h. Kegiatan Budaya dan Agama: Mengadakan kegiatan budaya dan agama yang merayakan keberagaman dan meningkatkan pemahaman antarumat beragama. Festival, pameran seni, dan acara budaya lainnya dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan harmonis.

i. Pelatihan Bela Negara: Menyelenggarakan program pelatihan bela negara yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang memperkuat semangat patriotisme, tanggung jawab terhadap negara, dan pemahaman tentang keamanan nasional.
j. Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program-program moderasi beragama dan bela negara. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan inisiatif yang telah dilaksanakan.

Penting untuk melibatkan seluruh komunitas kampus, termasuk dosen, staf, dan mahasiswa, dalam proses implementasi ini. Komunikasi terbuka, partisipasi aktif, dan dukungan penuh dari pimpinan kampus sangat penting untuk kesuksesan program moderasi beragama dan bela negara di UI.

2. Implementasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Gajah Mada

Implementasi GMBBN di Universitas Gajah Mada adalah sebagai berikut:

a. Moderasi beragama di UGM lebih ditekankan pada aspek multikulturalisme, karena UGM merupakan miniatur Indonesia dengan adanya beragamnya suku dan ras, etnis yang berbeda.
b. Moderasi beragama melalui perkuliahan umum, dengan mengundang narsum, UKM keluarga muslim fakultas, melalui dosen dengan pelibatan sebagai pengurus FKPT, dan kemitraan lembaga terkait.

3. Implementasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Surabaya

UNESA dalam rangka penerapan internalisasi serta insersi Moderasi Beragama dan Bela Nagara melaui beberapa tindakan sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan isu strategis
b. Melakukan Mitigasi Kebencanaan pada bencana alam dan konflik sosial sebagai bentuk kepedulian Universitas Negeri Surabaya dalam membantu pemerintah untuk penanggulangan kebencanaan dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh.
c. Melakukan penanganan (preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif) terhadap permasalahan isu strategis yang meliputi kekerasan seksual, pencegahan narkoba, mitigasi bencana dan K3, kesehatan mental, ideologi moderasi beragama dan bela negara untuk civitas akademika Universitas Negeri Surabaya dan masyarakat eksternal yang membutuhkan.
d. Mengembangkan pengetahuan dan memberikan keterampilan kepada civitas akademika dalam penanggulangan isu strategis di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
e. Mengembangkan kajian riset permasalahan yang berkaitan dengan isu strategis kampus.
f. Mengembangkan kerja sama lintas disiplin, lintas profesi dan lintas budaya secara preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif terhadap isu strategis di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Upaya pencegahan Paham Radikal:

a. Integrasi di Mata Kuliah Agama dalam buku PAI yang ada di Unesa dengan Sub. tema MBBN
b. Melalui hidden curriculum
c. Sosial Champaign di medsos UNESA dengan isu-isu strategis
d. Membuat video anti kekerasan

4. Implementasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Malang

Yang Penting dan perlu untuk diingat Bersama bahwa implementasi moderasi beragama memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh komunitas kampus. Seiring waktu, dampak positif moderasi beragama dapat membentuk budaya kampus yang lebih inklusif, toleran, dan mendukung pertumbuhan intelektual dan sosial mahasiswa.

Best Practice Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Universitas Negeri Malang dalam menanamkan Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui Internalisasi serta insersi moderasi beragama dan bela nagara dengan berbagai macam pendekatan antara lain adalah Insersi Nilai-Nilai Moderasi Beragama (MB) dalam Kurikulum.

Tahapan Model yang dilakukan meliputi: (1) Penetapan Moderasi Beragama sebagai Mata Kuliah Institusi, (2) Insersi Nilai-nilai Moderasi Bearagama pada Mata Kuliah yang Relevan, (3) Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Bearagama melalui *Indirect Teaching* atau *Hidden Curriculum*, dan (4) Integrasi nilai-nilai Moderasi

Beragama melalui Budaya Kampus.

a. Penetapan Moderasi Beragama sebagai Mata Kuliah Institusi, Tahapanya meliputi:
    1) Merumuskan CPL-Prodi aspek Sikap (S), dan aspek Pengetahuan (P), barbasis nilai-nilai Moderasi Beragama.
    2) Menentukan "bahan kajian" berbasis Moderasi Beragama untuk CPL-Prodi aspek Sikap (S), aspek Pengetahuan (P), aspek Ketrampilan Umum (KU), dan aspek Ketrampilan Khusus (KK) dalam bentuk peta konsep.
    3) Menentukan nama Mata Kuliah berbasis Moderasi Beragama sebagai MK Institusi serta beban SKS.
    4) Menyusun RPS untuk MK Moderasi Beragama.
b. Insersi Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Mata Kuliah Yang Relevan
    1) Mengidentifikasi nilai-nilai Moderasi Beragama di CPLProdi, aspek Sikap.
    2) Mendistribusikan CPL-Prodi yang terkait dengan aspek sikap (S) pada MK yang relevan.
    3) Merumuskan CPMK (courses learning outcome) barbasis nilai-nilai Moderasi Beragama
    4) Merumuskan sub-CPMK (lesson learning outcome) berbasis nilai-nilai Moderasi Beragama.
    5) Menyusun RPS berbasis Moderasi Beragama.
    6) Materi Moderasi Beragama yang Diinsersi dalam Mata Kuliah yang Relevan seperti Isu: Wasathiyah Islamiyah, Radikalisme atas nama agama, Cinta tanah air, Menghargai

kemajemukan dan pluralitas, Menjunjung tinggi harkat & martabat kemanusiaan, Respon Islam terhadap budaya dan tradisi local, Perempuan dan feminism, Hak asasi manusia dan demokratisasi, *Civil society.*

c. Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui *Hidden Curriculum*
    1) Agar sivitas PT memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku moderat yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, dilaksanakan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama bagi semua warga kampus (dosen, tendik, dan mahasiswa) melalui kegiatan non SKS.
    2) Kegiatan yang dimaksud dapat berbentuk: lokakarya MB, training of trainers (ToT) MB, pelatihan instruktur MB, workshop penggerak MB, orientasi pelopor MB, dan dan sejenisnya.
d. Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Budaya Kampus
    1) *Campus culture* adalah pendekatan penguatan nilai moderasi beragama berbasis budaya kampus yang memberikan penghargaan terhadap semua sivitas PT, tanpa diskriminasi berlatar agama, suku, paham, keyakinan, pandangan keagamaan, status sosial dan ekonomi, serta yang mengembangkan interaksi yang harmonis, aman, dan nyaman antar warga kampus.
    2) Pengembangan nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui penguatan kebijakan pimpinan PT yang mendukung terwujudnya

kampus moderat: peraturan rektor tentang rambu-rambu kehidupan beragama, surat edaran tentang penggunaan ruang publik, dan sejenisnya.

e. Advokasi Masyarakat untuk Menjiwai Moderasi Beragama
    1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis moderasi beragama dan kebangsaan
    2) Rumah dan sekolah moderasi beragama
    3) Duta pelopor moderasi beragama
    4) Komunitas binaan moderasi beragama
    5) Desa Pancasila

5. Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Malang

    Implementasi moderasi beragama dan bela negara di Universitas Islam Malang melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut:

    a. Menerima Mahasiswa meskipun dari Agama selain Islam

        Universitas Islam Malang adalah kampus yang berlandaskan agama Islam atau banyak yang menyebut kampus yang diperuntukkan bagi orang muslim, bahkan ada anggapan jika kampus sudah mengusung nama agama seperti Universitas Islam, Universitas katolik, dan lain sebagainya dianggap tidak boleh kuliah dikampus tersebut kalau tidak seagama.

        Universitas Islam Malang dikenal sebagai kampus yang berlandaskan agama Islam, namun kampus ini terbuka untuk semua orang tanpa

memandang latar belakang agama, ras, atau budaya. Kampus ini juga menjalin hubungan dengan instansi lain untuk meningkatkan mutu dan kualitas kampus itu sendiri. Fokus kampus dalam menjalin relationship dengan kampus lainnya adalah tentang manajemen perkulihan yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga tidak ada diskriminasi dalam hal apapun, dan semua orang dapat kuliah di kampus ini tanpa masalah.

Dalam hal ini tujuan UNISMA membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau menimba ilmu di kampus UNISMA adalah untuk membangun UNISMA mencapai World Class University. dimana management UNISMA tidak focus pada perbedaan yang ada melainkan bagaimana bisa menyatukan perbedaan yang ada agar bisa hidup berdampingan dan berbarengan mencapai tujuan atau visi dari Universitas Islam Malang.

b. Kuliah keagamaan dengan materi Tarikh Tasyri', Hujjah An-Nadliyah, dan ke-Aswaja-an

Mengenai kehidupan mahasiswa non-muslim yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kehidupan mahasiswa muslim lainnya, UNISMA selalu menyediakan strategy-strategy untuk memperkuat dan memperkokoh keyakinan/keimanan seluruh masyarakat UNISMA yang muslim, seperti melalui kajian rutin, adanya mata kuliah aqidah dan aswaja, menanamkan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah akhir perkuliahan dengan doa yang sudah menjadi ciri khas UNISMA, dan lain sebagainya.

Kegiatan ini menjadi bagian penguatan UNISMA, misi internalisasi nilai-nilai aswaja secara istiqomah. Penerapan nilai tawasuth atau moderat didalam beberapa perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi kekayaan besar indonesia dengan peningkatan multikultural dan pluralis. Disertai dengan deklarasi di UNISMA sebagai kampus pelopor anti radikalisme dan intoleran.

c. Peningkatan efektivitas pembelajaran Agama Islam

Menyusun kurikulum yang mencakup berbagai perspektif dan pemahaman terhadap Islam, dari tradisional hingga kontemporer. Pada Program Studi Strata S-1 Sarjana di semua Fakultas yang ada di UNISMA dalam rangka menjaga kualitas mutu Pendidikan, untuk memperoleh gelar Sarjana mahasiswa diwajibkan menyelesaikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan selama 6 Semester menggunakan buku/Modul 1-6.

Ujian pendalaman agama

1) Memiliki panduan yang jelas tentang teknis pelaksanaan ujian pendalaman agama.
2) Mendapatkan kepastian setiap mahasiswa bisa membaca Al-Qur'an, sholat dengan baik dan memahami materi agama 1-6.

6. Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Wahid Hasyim Semarang

Moderasi beragama dimaknai dengan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi serta filosofi masyarakat Indonesia dan menjadi sebuah cara dalam melakukan pemikiran yang sistematis dan rasional untuk menjadikan sikap, perilaku, dan cara pandang dalam

beragama yang moderat sebagai perspektif dan landasan berfikir yang diterima bersama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Saifuddin, 2019). Moderasi beragama diartikan beragam oleh para intelektual, secara umum moderasi beragama dimaknai dengan salah satu antithesis dari keberadaan dua kutub yang berseberangan secara ekstrem antara radikal dan liberal.

Moderasi beragama ini setidaknya dibangun atas beberapa prinsip diantaranya yaitu prinsip at-tawazun (keseimbangan) dan prinsip *syumuliyyah* (universal) (Al-Qaradhawi, 2009). Moderasi beragama merupakan solusi alternatif atas hadirnya dua kutub ekstrem yang saling bersebrangan dalam beragama (Hadikusuma, 2010), moderasi harus dimaknai sebagai middle way atau jalan tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Harus dipahami bahwa moderasi beragama harus mencerminkan sikap yang balance antara pengamalan diri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain (Fahri & Zainuri, 2019). Yang menjadi landasan pokok dan mendasar moderasi beragama ialah dengan menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan wahyu, antara hak dan kewajiban, antara keharusan dan kesukarelaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara gagasan ideal dan kenyataan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Penguatan moderasi beragama adalah sebuah

upaya bersama dalam rangka menjaga, merawat dan membangun kerukunan umat beragama. Penguatan moderasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan sistem sosial secara majemuk dan heterogen di era modern ini. Tentunya hal itu perlu dilakukan secara sistematis, terencana dan melalui langkah sinergis yang baik agar terjalin penguatan satu sama lain ibarat sapu ijuk/ sapu lidi. Hal ini bisa dilakukan melalui unit lembaga salah satunya pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Kampus Aswaja.

Penguatan Moderasi Beragama menjadi agenda yang terus dilakukan Kementerian Agama. Tidak hanya di lembaga keagamaan, penguatan moderasi beragama juga dilakukan di lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, terlebih-lebih di perguran tinggi. Khusus di Perguran Tinggi Umum, dalam hal ini Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Kampus Aswaja, mengimplementasikan penguatan moderasi beragama melalui Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Agama Islam, Ke-Aswajaan, Pancasila dan Kewarganegaraan, di dalam kajian materi mata kuliah tersebut telah dicantumkan materi atau pokok bahasan yang menguatkan tentangnya pentingnya moderasi beragama dan bela negara. Moderasi beragama dan bela negara diajarkan melalui rencana pembelajaran semester kepada seluruh mahasiswa dalam rangka memperkenalkan sekaligus menanamkan nilai-nilai agama dan bela negara. Sehingga mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut memiliki integritas, solidaritas, cintah tanah air,

rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara, dan sadar Pancasila sebagai dasar negara.

Disamping itu juga Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Wahid Hasyim Semarang melalui Lembaga Pusat Kajian Aswaja, yang menaungi Aswaja Centre dan Pegiat Aswaja Muda Unwahas. Pengurus Aswaja Centre Unwahas terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dalam bidang pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah.

Melalui Aswaja Centre Unwahas, semua mahasiswa baru wajib mengikuti *screening* ideologi dengan mengikuti Kegiatan Orientasi Ke-Aswajaan selama kurang lebih tiga hari, dari kegitan tersebut, jika ditemukan mahasiswa yang mempunyai idelogi atau faham yang ektrim, baik kanan maupun kiri, maka akan dilakukan pembinaan lebih lanjut, sehingga pemahaman-pemahaman yang tadinya ekstrim, sedikit demi sedikit menjadi lentur, setelah itu doktrinasi-doktrinasi Islam yang ramah dan moderat selalu disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Perlu diketahui Bersama bahwasannya paham Ahlusssunnah Wal Jamaah (Aswaja) sebagai paham dalam Islam menjadi landasan utama di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Ahlusssunnah Wal Jamaah (Aswaja) sebagai paham dalam Islam menjadi landasan utama di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Dan Mahasiswa Unwahas ini sangat plural, dari berbagai latar belakang sekolah, agama dan ada juga yang berasal dari luar negeri seperti Thailand,

Tiongkok, Afganistan, dan sebagainya.[16]

Sedangkan Pegiat Aswaja Muda merupakan tangan panjang dari Pusat Kajian Aswaja untuk menyentuh para mahasiswa, karena pemahaman Moderasi Beraga dan Bela Negara akan lebih mudah diterima, jika yang menyampaikan adalah sesame temannya, yakni sesame mahasiswa. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para Pegiat Aswaja Muda (PAM) Unwahas telah dilakukan, diantaranya adalah mebuat tulisan-tulisan tentang kegiatan dan Islam yang ramah, artikel tersebut dipublish pada website Aswaja Center Unwahas (https://aswajacentre.unwahas.ac.id/), membuat konten-konten video terkait moderasi beragama diunggah pada chanel youtube Pegiat Aswaja Muda (https://www.youtube.com/@AswajaMudaUnwahas).

Dengan demikian Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Kampus Aswaja dapat menjadi role model dalam pengimplementasian moderasi beragama dan bela negara.

7. Impelementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Pendidikan Indonesia
   a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

      Arah moderasi beragama dan bela negara di UPI dalam bidang Pendidikan, danpelatihan diarahkan pada:
   b. Penguatan wawasan, sikap, dan perilaku moderasi beragama dan bela negara mahasiswaUPI

[16] Penyampaian Rektor Unwahas dalam pembukaan orientasi Keaswajaan tahun 2022.

Tiga aspek penting dalam upaya mewujudkan pribadi yang moderat menjadi arah moderasi beragama dan bela negara UPI, yaitu aspek wawasan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Keberadaan mata kuliah Pendidikan Agama, Seminar Pendidikan Agama, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wadah intrakurikuler, ditambah keberadaan Program Tutorial PAI sebagai wadah kokurikuler dan UKM Keagamaan sebagai wadah ekstrakurikuler serta keberadaan *Islamic Tutorial Centre*, Masjid Alfurqan, dan Pusat Kajian Pancasila sebagai wadah kelembagaan dalam pembinaan moderasi beragama dan bela negara perlu diperkuat dengan beragam ikhtiar tambahan. Melalui bidang pendidikan dan latihan ini dapat dirancang berbagai program kerja yang mengarah kepada penguatan wawasan, sikap, dan perilaku moderasi beragama dan bela negara mahasiswa UPI seperti kegiatan seminar dan lokakarya, workshop, FGD, *Training of Trainer*, Outbond, Perkemahan, melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya, baik internal UPI maupun eksternal.

c. Pembinaan Mahasiswa UPI

Sebagai kader dan duta moderasi beragama dan bela negara Sebagai generasi penerus bangsa dan elit masyarakat, mahasiswa UPI diharapkan bisa menjadi kader dan duta moderasi beragama dan bela negara di lingkungan kampus pada khususnya dan di tengah masyarakat, pada umumnya. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara UPI

mendorong para mahasiswa untuk bisa menyuarakan dan menyebarluaskan wacana pentingnya hidup beragama secara moderat dalam konteks membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka diharapkan bisa berperan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengarus-utamaan moderasi beragama dan bela negara, seperti dalam bentuk seminar, workshop, studi club, dan lain sebagainya. Mereka juga diharapkan bisa membuat berbagai bentuk media atau alat yang dapat digunakan untuk penyebarluasan ide dan gagasan moderasiberagama dan bela negara, seperti membuat spanduk, banner, leaflet, brosur, stiker, souvenir (gantungan kunci, topi, baju kaos), dan lain sebagainya. Diseminasi ide moderasi beragama dan bela negara juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui aplikasi-aplikasi berbasis Internet, Android dan iOS, seperti Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok, Videos, dan lain sebagainya.

Pembinaan mahasiswa UPI sebagai kader dan duta moderasi beragama dan bela negara ini dilakukan dengan pertama-tama menyaring sejumlah mahasiswa dan membentuk komunitas kader dan duta moderasi beragama dan bela negara UPI. Langkah berikutnya adalah mengadakan pelatihan dan workshop dan berbagai kegiatan lain, bagi mahasiswa-mahasiswa yang terpilih sebagai kader dan duta moderasi beragama dan bela negara di kampus UPI.

Evaluasi dan pendampingan dilakukan oleh Tim Griya Moderasi Beragama dan BelaNegara UPI secara berkesinambungan (*sustainable*) secara periodik. Tim melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar kampus, dalam menjalankan tugas pembinaan ini. Dengan upaya ini, tugas bersama menjaga kerukunan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara bisa terlaksana dan tercipta dengan baik.

d. Penciptaan kultur moderat sivitas UPI dalam kehidupan keseharian di kampus

Untuk dapat menjadi cara pandang, sikap dan perilaku beragama, maka moderasi beragama harus dituangkan menjadi langkah-langkah yang terstruktur agar dapat diukur tingkat keberhasilannya. Setidaknya ada empat langkah terstruktur dari moderasi beragama yang ditawarkan Saifuddin (Saifuddin 2019) dan (Kementrian Agama RI, 2020) yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal atau penerimaan terhadap tradisi. Agar indikator tersebut dapat menjadi hal yang terukur maka dituangkan dalam beberapa indikator dari masing-masing indikator tersebut. Untuk komitmen kebangsaan maka dapat diukur dari cara pandang, sikap dan perilaku seseorang dalam menerima dan mengamalkan perinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi dibawahnya, atau dapat dimaknai

juga dengan cinta tanah air. Selain itu sikap yang terukur dari komitmen kebangsaan berarti seseorang mampu hidup berdampingan dengan perbedaan, dan menerima ideology negara, menghargai pemerintahan yang sah, melaksanakan amanat UUD 1945.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauhmana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadapkonsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah samadengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama, karena mencintai negara sebagian dari iman.

Untuk indikator seseorang memiliki cara pandang, sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari toleransi, maka dapat diukur dari sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Selainitu indikator lainnya yang bisa diukur adalah dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberikan kebebasan dan ruang kepada orang lain untuk memeluk agama dan

keyakinnya, memberikan ruang untuk mengekspresikan kepercayaan dan keyakinan, memiliki persamaan dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan keragaman serta mampu hidup berdampingan untuk saling bersinergi dan berkerja sama. Toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Indikator selanjutnya dari moderasi beragama adalah anti kekerasan, sikap ini dapat diukur ketika seseorang menghindari dan menolak menggunakan kekerasan dalam menyampaikan pendapat dan mengusung perubahan yang di inginkan, menyerang dan mengintimidasi orang lain yang berbeda pemahaman dengan ajarannya, melakukan perubahan dan perlawanan secara ekstrem apabila terjadi kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, yang diaktualisasikan secara pikiran, ucapan maupun perbuatan. Inti dari tindakan kekerasan yang dapat terukur adalah sikap dan

tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku.

Indikator terakhir dari moderasi beragama adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal atau penerimaan terhadap tradisi, hal ini dapat diukur melalui tingginya penerimaan sertaramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Hal lain yang dapat diukur adalah tidak mudah membidahkan dan mengkapirkan orang yang melaksanakan ritual budaya dan agama, tetapi bersipat akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan.

Selain itu, langkah-langkah yang dapat ditempuh dan terstrukur dalam menciptakan moderasi beragama di perguruan tinggi yaitu dengan cara menanamkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan

ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter; Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; dan Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan agar moderasi beragama menjadi program yang terstruktur adalah dengan cara penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama sebagai jalan tengah; Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; Penguatan relasi agama dan budaya; Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan; Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat seperti pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

e. Pengarahan dan pengembangan kebijakan kampus pro moderasi beragama dan bela negara

Moderasi Beragama dan Bela Negara merupakan kebutuhan utama dalam Masyarakat yang plural agar tetap tercipta harmonisasi dalam keberagaman. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik heterogen harus dapat mengembangkan kultur moderasi beragama dan bela negara dalam kegiatan akademis maupun non akademis. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang memiliki motto kampus ilmiah, edukatif, dan religius idealnya menghasilkan kebijakan universitas yang pro terhadap moderasi beragama dan bela negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kelembagaan dan pendidikan. Kebijakan tersebut tertera pada Renstra UPI 2021-2025 yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, kebenaran hakiki, ilmiah, edukatif, religius, dan menjunjung hak asasi manusia serta demokrasi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, Keberadaan MKWK (Mata Kuliah Wajib Kurikulum) Pendidikan Agama Islam,

Kristen, Hindu), Seminar Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang memuat nilai religius dan bela negara, UKM bernuansa ke-Islaman dan Kristen, UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) yang menanamkan prinsip bela negara, Keputusan Rektor tanggal 28 Desember 2007 tentang Nomor 8145/H40/KM/ 2007 tentang Penetapan Penyelenggaraan Kegiatan Tutorial Mata Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Agama Islam.

8. Implementasi Program Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara

Melakukan advokasi atau pendampingan moderasi beragama dan bela negara; Melakukan upaya pencegahan dan penanganan Tindakan yang bertentangan dengan moderasi beragama; Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penguatan moderasi beragama dan bela negara pada perguruan tinggi. Program ini juga berjalaan dalam beberapa aspek.:

No.	Tridharma PT	Kegiatan
1	Pendidikan dan Pengajaran	ü Pengembangan Bahan Ajar PAI pada PTU (Materi Ke-PAI-an/Rumpun Ilmu Agama) ü Pengalaman

		(Pembelajaran) di Lapangan "Kampanye Moderasi Beragama dan Bela Negara di Daerah Perbatasan" ü Pengalaman (Pembelajaran) Bela Negara Bekerjasama dengan Direktur Bela Negara Kemhan ü Dialog Antar Umat Beragama di Lingkungan Kampus
2	Penelitian	Ruang Lingkup Tema Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Proses Pembelajaran
3	Pengabdian Kepada Masyarakat	"Moderasi Beragama dan Bela Negara Campaign"

9. Implementasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Garut

   Universitas Garut dalam rangka penerapan internalisasi serta insrsi moderasi beragama dan bela nagara dengan berbagai mancam pendekatan antara lain:

a. Penyusunan Kebijakan Institusional: Mengembangkan kebijakan institusional yang mendukung nilai-nilai moderasi beragama dan bela negara. Kebijakan ini dapat mencakup komitmen terhadap toleransi, dialog antarumat beragama, serta partisipasi aktif dalam pembangunan negara.
b. Integrasi dalam Kurikulum: Menyusun kurikulum yang mengintegrasikan konsep moderasi beragama dan bela negara dalam berbagai mata kuliah atau program studi. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa menerima pendidikan yang mencakup aspek-aspek ini.
c. Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk staf pengajar dan mahasiswa agar mereka dapat memahami konsep-konsep moderasi beragama dan bela negara dengan lebih baik.
d. Diskusi dan Seminar: Menyelenggarakan diskusi dan seminar rutin yang membahas isu-isu moderasi beragama, toleransi, serta peran mahasiswa dalam bela negara.
e. Pengembangan Program Pengembangan Diri: Membuat program pengembangan diri untuk mahasiswa, termasuk kegiatan-kegiatan yang mendorong karakteristik moderasi, tanggung jawab sosial, dan semangat bela negara.
f. Kegiatan Kebudayaan dan Agama: Mengadakan kegiatan yang merayakan keberagaman budaya dan agama di kampus. Ini dapat mencakup festival, pameran seni, dan acara budaya lainnya.

g. Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan: Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas keagamaan untuk mendukung program-program moderasi beragama dan bela negara.
h. Pengembangan Materi Pendidikan: Membuat materi edukasi dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh anggota kampus, termasuk materi online, brosur, dan poster yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan bela negara.
i. Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program-program moderasi beragama dan bela negara. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan inisiatif yang telah dilaksanakan.

C. Implikasi Moderasi Beragama dan Bela Negara Pada Perguruan Tinggi Umum

1. Implikasi Implementasi Moderasi Beragama Dan Bela Negara Di Universita Indonesia

   Penerapan moderasi beragama dan bela negara di kampus Universitas Indonesia (UI) dapat memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa implikasi dari penerapan dua konsep tersebut di lingkungan kampus:

   a. Terbentuknya Lingkungan Kampus yang Inklusif: Moderasi beragama dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif, di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang agama merasa diterima dan

dihormati. Hal ini dapat mendorong dialog antarumat beragama dan mengurangi potensi konflik atau ketegangan beragama di kampus.

b. Pembentukan Pemikiran Moderat:

   Penerapan moderasi beragama dapat membantu membentuk pemikiran moderat di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dapat diajak untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan agama, serta menghindari ekstremisme agama yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kampus.

c. Penguatan Semangat Bela Negara:

   Program bela negara dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan tanggung jawab terhadap negara di kalangan mahasiswa. Ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan nasional.

d. Peningkatan Kesadaran Terhadap Isu Keamanan Nasional:

   Melalui program bela negara, mahasiswa dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu keamanan nasional. Ini dapat mencakup peningkatan kesadaran terhadap ancaman internal dan eksternal serta peran mahasiswa dalam mendukung keamanan negara.

e. Mendorong Kegiatan Sosial dan Pelayanan Masyarakat:

   Konsep bela negara dapat merangsang mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Penerapan ini dapat

membantu mahasiswa mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan keterlibatan dalam pembangunan masyarakat.

f. Peningkatan Reputasi Universitas:

Jika penerapan moderasi beragama dan bela negara berhasil menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan positif, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi UI. Universitas yang dianggap sebagai tempat pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai ini dapat menarik minat calon mahasiswa dan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat.

g. Membantu Menangkal Radikalisasi dan Ekstremisme:

Penerapan moderasi beragama dapat menjadi langkah preventif untuk menangkal radikalisasi dan ekstremisme di kalangan mahasiswa. Dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan mendorong toleransi, kampus dapat berkontribusi pada upaya pencegahan.

Harapannya, penerapan moderasi beragama dan bela negara di kampus UI akan membawa dampak positif dalam membentuk karakter mahasiswa dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik. Namun, penting untuk memastikan bahwa penerapan ini dilakukan dengan bijaksana dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan akademis.

2. Implikasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Gajah Mada

Implikasi dari program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Gajah Mada adalah sebagai berikut:

a. Program ini dapat meningkatkan pemahaman dan sikap moderasi dalam beragama di kalangan mahasiswa UGM, yang berarti beragama secara adil, seimbang, tidak ekstrem, dan tidak berlebihan, serta menghormati keragaman dan perbedaan keyakinan.
b. Program ini dapat membentuk karakter mahasiswa UGM yang toleran, inklusif, anti kekerasan, dan berkomitmen pada Pancasila sebagai konsensus dalam berbangsa dan bernegara.
c. Program ini dapat menjadi laboratorium kehidupan bagi mahasiswa UGM untuk memperoleh pengalaman dari pengamalan Pancasila, serta menjadi inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk menjadi insan akademika yang berbudi luhur.
d. Program ini dapat memastikan hak individu memeluk agama menjadi tidak terganggu, sebab salah satu prinsip dasar demokrasi dan HAM adalah hak setiap warga negara untuk dihargai dan dilindungi dalam beragama.
e. Program ini dapat menurunkan konflik sosial yang berdampak pada ancaman keutuhan negara, sebab tanpa moderasi beragama, kita akan mudah terlibat pertentangan antar agama dan konflik sosial. Menekan konflik sosial ini sudah menjadi bagian dari upaya bela negara.

f. Program ini dapat mewujudkan kehadiran negara dalam menjamin hak warganya dalam beragama dan meningkatkan toleransi dalam keberagaman, sebab GMBBN UGM merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang moderasi beragama dan bela negara di lingkungan perguruan tinggi, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia.

3. Implikasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Surabaya

Implikasi Griya MBBN di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek akademik: Griya MBBN dapat menjadi wadah bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan UNESA untuk belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam mengembangkan moderasi beragama dan bela negara sebagai nilai dan sikap yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Griya MBBN juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang berkualitas dan relevan tentang moderasi beragama dan bela negara, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, kajian, penelitian, dan publikasi yang diselenggarakan oleh lembaga ini.
b. Aspek sosial: Griya MBBN dapat menjadi agen perubahan yang mendorong dan membantu masyarakat dalam menerapkan moderasi beragama dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Griya

MBBN juga dapat menjadi mitra kerjasama yang strategis bagi berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan, dalam upaya membangun kehidupan yang harmonis, toleran, dan inklusif di tengah keragaman dan kebinekaan bangsa Indonesia.

c. Aspek nasional: Griya MBBN dapat menjadi garda terdepan dalam upaya penguatan moderasi beragama dan bela negara di Indonesia. Griya MBBN juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi perguruan tinggi umum lainnya untuk mengikuti jejak UNESA dalam membentuk lembaga serupa. Griya MBBN juga dapat menjadi bagian dari solusi dalam menangkal segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal, yang dapat menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi negara.

4. Implikasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Malang

Implikasi moderasi beragama di Universitas Negeri Malang atau di institusi pendidikan umumnya dapat bervariasi tergantung pada bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dan diterapkan dalam lingkungan tersebut. Moderasi beragama mengacu pada pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap keberagaman keyakinan agama di dalam masyarakat.

Berikut beberapa implikasi yang mungkin muncul akibat moderasi beragama di Universitas Negeri Malang:

a. Inklusivitas dan Keanekaragaman:

Peningkatan atmosfer inklusif di kampus

dengan menerima dan menghormati berbagai keyakinan agama dan Keterlibatan dan partisipasi yang lebih besar dari mahasiswa dari latar belakang agama yang beragam.

b. Pendidikan Multikultural:

   Fokus pada pengembangan pemahaman lintas budaya dan keberagaman agama sebagai bagian integral dari Kurikulum dan Pembelajaran dan diskusi yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan budaya yang berbeda.

c. Toleransi dan Dialog Antaragama:

   Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antar anggota komunitas kampus untuk memahami perbedaan keyakinan dan mencari kesamaan dan membuat Kegiatan atau forum diskusi yang mendukung pemahaman dan mengatasi stereotip atau prasangka agama.

d. Keseimbangan antara Kebebasan Beragama dan Nilai Kampus:

   Menciptakan kebijakan yang memungkinkan kebebasan beragama, sambil memastikan bahwa nilai-nilai inti kampus, seperti keadilan dan persamaan, dihormati, serta Penekanan pada norma-norma etika dan nilai-nilai yang bersifat inklusif.

e. Kesejahteraan Mental dan Emosional:

   Pemberdayaan mahasiswa untuk merasa aman dalam menjalani keyakinan agama mereka tanpa takut diskriminasi atau penindasan. Serta pelayanan kesehatan mental yang mencakup kebutuhan spiritual dan religius.

f. Penguatan Citra Kampus:

Meningkatkan citra universitas sebagai lembaga yang membuka pintu untuk semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan meningkatkan daya tarik bagi mahasiswa dari berbagai kelompok agama.

g. Kontribusi terhadap Kesejahteraan Sosial:

Mendorong pengembangan pemimpin dan profesional yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan mampu bekerja dalam masyarakat yang beragam.

h. Pemberdayaan Mahasiswa:

Memberikan mahasiswa keterampilan dan pengetahuan untuk hidup dalam masyarakat yang beragam secara damai dan saling mendukung.

i. Kemitraan antara Lembaga Keagamaan dan Kampus:

Membangun hubungan yang kuat antara universitas dan lembaga keagamaan untuk saling mendukung dan memajukan pendidikan dan toleransi.

5. Implikasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Malang

Penting untuk memahami bahwa pendekatan moderasi beragama di Universitas Islam Malang yang merupakan institusi Islam dapat memperkaya pemahaman agama, mengurangi ketegangan antarkeyakinan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan holistik mahasiswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa

lulusan dari institusi semacam itu dapat membawa dampak positif dalam masyarakat yang lebih luas.

Implikasi moderasi beragama di Universitas Islam Malang atau di institusi pendidikan Islam umumnya akan mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap berbagai interpretasi dan praktik agama Islam. Ini dapat memiliki dampak berikut:

a. Pengembangan Pemahaman Agama yang Lebih Luas: Mendorong pemahaman yang lebih luas dan inklusif terhadap ajaran Islam, mengakui keragaman pandangan dan interpretasi dalam komunitas Islam.
b. Dialog Antaragama: Dengan mempromosikan dialog konstruktif antara mahasiswa dan staf dengan keyakinan agama yang berbeda dan Menyelenggarakan kegiatan dialog antaragama untuk meningkatkan pemahaman dan saling menghormati.
c. Toleransi dan Keanekaragaman Budaya: Mendorong toleransi terhadap perbedaan dalam praktik keagamaan dan budaya dan Memberikan perhatian pada keanekaragaman budaya dan etnis dalam lingkungan kampus.
d. Pembinaan Kepemimpinan Agama Moderat: Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung munculnya pemimpin agama yang moderat dan mampu memfasilitasi dialog positif.
e. Pendidikan Multidisiplin: Menyertakan aspek-aspek kritis dan kontekstual dalam kurikulum Islam untuk memahami isu-isu global dan lokal dengan sudut pandang yang lebih luas.

f. Keseimbangan antara Agama dan Ilmu Pengetahuan: Mempromosikan pendekatan yang seimbang antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, merangkul konsep penelitian dan inovasi.

6. Implikasi Moderasi Beragama dan Bela negara di Universitas Wahid Hasyim Semarang

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh founding fathers Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Senada dari urian diatas, kehadiran GMBBN sangatlah penting, kenapa penting karena denga adanya trobosan itu cita-cita para pendiri negara bisa terlaksana, pemuda dalam hal ini mahasiswa adalah investasi bangsa, penerus tongak estavet kepemimpinan bangsa, program-praom diatas setidaknya memberikan manfaat

dianatanya;

a. Menumbuhkan jiwa patriotisme dan kepedulian terhadap bangsa
b. Terwujudnya kampus yang moderat, SDM yang unggul dan berbudi pekerti yang baik
c. Membentengi mahasiswa dan manasyarakat dari radikalisme, ekstremisme, dan fanatisme.

7. Implikasi Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Pendidikan Indonesia
   a. Keberagaman sivitas UPI baik dari aspek keyakinan madzhab/agama (*multireligious*), budaya (*multicultural*), maupun suku bangsa (*multiethnic*).

      Keberagaman di UPI terlihat dalam proses interaksi di kampus, yang dapat dirasakanlangsung oleh setiap stakeholder. Dengan motto: ilmiah, edukatif, dan relijius, proses interaksi antar keyakinan kepercayaan, adat budaya, dan ethnic tampak harmoni di kampus relijius ini. Berbagai kegiatan kemahasiswaan baik yang terintegrasi dengan Mata Kuliah Umum ataupun kegaitan lainnya sarat akan makna baik dari aspek relijius, kultur, dan etnik. Selain itu juga letak geografis kampus UPI di tanah Pasundan menjadi simbol bagaimana masyarakat Sunda memelihara nilai-nilai leluhur, sebagaimana etnik lainnya di Indonesia. Nilai moral budaya Sunda merupakan jati diri etnik Sunda yang bersumber pada nilai, kepercayaan, dan peninggalan budaya Sunda yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku.

      Sekaitan dengan itu moto Pemerintah Daerah Jawa Barat dan juga telah dianggap sebagai moto

nasional yaitu sebagaimana tercermin dalam kalimat "Silih Asih Silih Asah dan Silih Asuh" . Konsep yang mengajarkan bahwa sesama manusia harus saling mencintai. Ketika ada musibah dan kemiskinan, tanpa diperintah sesama datang membantu, demikian juga ketikadilanda ketakutan, otomatis diciptakan keamanan dan ketenangan agar sesama tidak lagi merasa takut. Konsep silih asah menghendaki sesama manusia harus saling memajukan secaraintelektual dan wawasan. Tidak ada saling sabot ataupun saling tutupi informasi. Kecerdasan dapat menyebabkan orang berani dan kritis. Semakin banyak orang cerdas, semakin menunjukkan bahwa silaturahmi bagus. Dalam kaitan ini tidak ada pemilahan, semua sama karena sesama manusia adalah saudara. Ketika upaya mencerdaskan dilacurkan, maka hal demikian menjadi tanggung jawab bersama. Konsep silih asuh mengajarkan untuk memperhatikan sesama agar terbebas dari berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi orang tersebut. *Watawa saubil haq watawa saubis sobr* tampaknya sangat pas dengan konsep ini. mengingatkan sesama adalah pengamalan asuh. Secara filosofis landasan berpikir sebagaimanaterungkap di atas diinternasilisasikan sedemikian rupa oleh UPI dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa (Platform UPI BHMN; SK Rektor UPI 2005). Setelah meneilisik motto dari Kampus UPI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diatas, tidak dapat diragukan lagi bahwa Universitas pendidikan Indonesia (UPI) yang berada

di wilayah Jawa Barat dapat dianggap sebagai wilayah ”Miniatur Indonesia” yang secara tidak langsung mewakili indikator dalam konsep Moderasi Beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dari UPI untuk Indonesia yang inklusif.

b. Kebijakan UPI tentang kampus religius

Meski UPI merupakan perguruan tinggi umum yang tidak berafiliasi secara khusus dengan organisasi keagamaan, namun aspek keagamaan menjadi salah satu *core* dari eksistensi UPI dalam dunia pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari moto “religius” yang menjadi salah satu moto UPI disamping moto ilmiah dan edukatif. Moto ini dicanangkan sejak UPI masih bernama IKIP Bandung, tepatnya tahun 1982 pada masa kepemimpinan Rektor Moh. Numan Somantri, hingga saat ini.

Dalam rencana strategis UPI 2021-2025 ditegaskan bahwa perwujudan visi UPI dilandasi oleh motto kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif dan religius. Lebih jauh dijelaskan bahwa religius di sini bermakna bahwa pendidikan pada hakikatnya bertujuan membangun pribadi manusia seutuhnya (*fully functioning person*) yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan moral, etika, dan kepribadian peserta didik. Dengan ditetapkannya religius sebagai salah satu moto UPI maka religiusitas menjadi salah satu orientasi kampus dalam

menetapkan beragam kebijakan dan dalam kultur kehidupan keseharian sivitas UPI.

c. Kebijakan UPI tentang mata kuliah Pendidikan Agama dan mata kuliah SeminarPendidikan Agama

Mata kuliah agama di UPI, secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan perguruan tinggi umum lainnya di Indonesia dalam beberapa hal. Setidaknya terdapat tiga persamaan, yaitu: (1) dalam kurikulum PTU mata kuliah agama masuk ke dalam kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang lebih dikenal dengan rumpun Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), yang dalam regulasi baru disebut dengan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), (2) mata kuliah ini wajib diberikan kepada setiap mahasiswa PTU sesuai dengan agama masing-masing dan dibimbing oleh dosen yang memiliki agama yang sama dengan mahasiswa, dan (3) mata kuliah agama di PTU diselenggarakan dalam lingkup *General Education* atau di Indonesia di kenal dengan Pendidikan Umum yang implementasinya dalam bentuk mata kuliah umum (MKU) (Rizal, 2012) atau Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) (Alwasilah & Puncochar, 2016).

Namun demikian, dalam tataran praktiknya, UPI memiliki kebijakan tersendiri terkait penyelenggaraan pendidikan agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam naskah kurikulum UPI, terdapat dua mata kuliah terkait pendidikan agama dengan bobot 2 sks untuk setiap mata kuliah. Pertama, mata kuliah pendidikan agama dengan

nama mata kuliah Pendidikan AgamaIslam untuk mahasiswa muslim, Pendidikan Agama Kristen untuk mahasiswa Katholik dan Protestan, Pendidikan Agama Hindu untuk mahasiswa Hindu, Pendidikan Agama Budha untukmahasiswa Budha, dan Pendidikan Agama Konghuchu untuk mahasiswa Konghuchu. Kedua,mata kuliah seminar pendidikan agama dengan penamaan seperti mata kuliah pendidikan agama, sebagai contoh untuk mahasiswa muslim, mata kuliah ini bernama Seminar Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah pertama ditempatkan pada tingkat I (semester 1 atau semester 2) perkuliahan, dan mata kuliah kedua ditempatkan pada tingkat III (semester 5 atau semester 6)perkuliahan. Kedua mata kuliah tersebut, wajib dikontrak oleh mahasiswa UPI baik S1 maupun D3 sesuai dengan agama masing-masing dan diajarkan oleh dosen yang memiliki agama yang sama.

Di Universitas Pendidikan Indonesia, perkuliahan agama, sebagaimana mata kuliah wajib umum lainnya (kecuali mata kuliah olah raga, seni, dan kuliah kerja nyata), diatur secara terpusat di bawah koordinasi Departemen Pendidikan Umum, Fakultas Pendidikan IlmuPengetahuan Sosial yang secara akademik dibawah tanggung jawab koordinatoriat mata kuliah. Koordinatoriat mata kuliah merupakan kumpulan dosen-dosen yang mengajar mata kuliah MKDU yang sama dan dipimpin oleh seorang koordinator. Terkait hal tersebut, untuk mata kuliah pendidikan agama

Islam, baik PAI maupun seminar PAI, secara akademik dikelola oleh koordinatoriat mata kuliah PAI dan Seminar PAI.

Terkait penyelenggaraan perkuliahan PAI di UPI, koordinatoriat PAI dan seminar PAI mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama, menjadikan kemampuan mahasiswa dalam membaca Alquran dengan baik dan benar sebagai pra-syarat kelulusan mata kuliah PAI. Kedua, mewajibkan setiap mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI maupun Seminar PAI untuk mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan di luar kelas dalam bentuk "Program Tutorial" sebagai upaya untuk membina moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Ketiga, menjadikan kelulusan mata kuliah PAI sebagai pra-syarat mahasiswa bisa mengambil mata kuliah seminar PAI di semester 4 atau 5.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pertama, terkait keharusan mahasiswa untuk mampu membaca Alquran dengan baik dan benar, pada setiap awal perkuliahan PAI dilakukan pemetaan kemampuan membaca Alquran mahasiswa. Kegiatan ini, dilaksanakan oleh koordinatoriat mata kuliah PAI dan seminar PAI bekerja sama dengan program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dan unit kegiatan mahasiswa BAQI. Setiap mahasiswa di tes kemampuan bacaan Alqurannya untuk kemudian dipetakan menjadi lima kategori, yaitu Tingkat Mahir (TM), Tingkat Terampil (TT), Tingkat Dasar

(TD), Tingkat Pra-Dasar 2, dan Tingkat Pra-Dasar 1. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, mahasiswa yang berada pada tiga kategori terakhir dianggap belum bisa membaca Alquran dan diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan membaca Alquran. Kebijakan ini dikeluarkan, terkait tingginya angka mahasiswa baru yang belum bisa membaca Alquran, yaitu di atas 60% pada setiap tahunnya.

Sementara itu, kebijakan kedua, terkait pembinaan keagamaan melalui "Program Tutorial", dilakukan sudah lebih hampir dari 20 tahun. Kegiatan tersebut awalnya dilakukan sebagai respon atas kebutuhan mahasiswa terhadap pembinaan keberagamaan sebagai akibat dari keterbatasan mata kuliah PAI untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, disamping pembiasaan ibadah amaliyah yaumiah bagi mahasiswa, program tutorial di UPI sangat berperan dalam proses internalisasi nilai toleransi sebagai bentuk pengamalan moderasi beragama dan Islam yang rahmatan lil'âlamîn sebagai garda terdapan dalam menangkal radikalisme di kampus.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan Mata Kuliah PAI di Universitas Pendidikan Indonesia sudah sesuai dengan kebijakan secara nasional dan telah memposisikan mata kuliah agama sebagai kurikulum wajib dalam rumpun mata kuliah wajib kurikulum. Bahkan UPI secara kelembagaan telah mengokohkan posisi mata kuliah agama dengan beberapa kebijakan strategis. Kebijakan-kebijakan

tersebut meliputi: penambahan bobot mata kuliah agama, pengembangan kegiatan kokulikuler agama dalam bentuk program tutorial, dan penyelenggaraan program literasi baca Alquran bagi mahasiswa tingkat I. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat jati diri UPI sebagai kampus yang bukan hanya edukatif dan ilmiah, tapi juga religious.

d. Kebijakan UPI tentang mata kuliah Pancasila dan mata kuliah PendidikanKewarganegaraan

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib diajarkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada pasal 27 ayat (3) "Setiap warganegara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara", dan Pasal 30 ayat (1), "Tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Amanah dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang pendidikan tinggi tersebut pasal 35 ayat (3), kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia. Mata kuliah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk program sarjanan danprogram diploma.

Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan

tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabutdari akar budayanya dan memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk membina mahasiswa sebagai warganegara muda untuk memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, dapat berperan dalam usaha bela negara dan menjadi warganegara yang memiliki jati diri bangsa. Pengembangan pendidikan Kewarganegaraan meliputi pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, berpikir nalar dan keterampilan sosial.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Universitas Pendidikan Indonesia memberikan kebijakan pengelolaan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendiddikan Kewarganegaraan di bawah Departemen Pendidikan Umum di lingkungan FPIPS. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing memiliki bobot 2 SKS. Ke dua mata

kuliah tersebut diajarkan kepada mahasiswa di lingkungan UPI di semester satu (semesterganjil) dan semester dua (semester genap). Materi pembelajaran Pendidikan Pancasila mencakup tujuh bab diantaranya 1) Pengantar memahami Pendidikan Pancasila, 2) Tinjauan historis Pancasila, 3) Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, 4) Pancasila sebagaisistem filsafat, 5) Pancasila sebagai dasar negara, 6) Pancasila sebagai sistem etika, dan 7) Pancasila sebagai dasar nilai pengembanmgan ilmu. Kemudian materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran mencakup delapan bab diantaranya 1) Pengantar memehami Pendidikan Kewarganegaraan, 2) Identitas nasional, 3) Integrasi nasional, 4) Konstitusi negaraIndonesia, 5) HAM dan rule of law, 6) Demokrasi di Indonesia, 7) Wawasan nusantara, dan 8) Ketahanan nasional dan bela negara. Dosen pengampu mata kulaih Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berlatar belakang dari program studi yang relefan yaitu dari program studi pendidikan kewarganegaraan dan program studi pendidikan umum yang sekarang ini menjadi program studi pendidikan umum dan karakter. Beberapa dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan lulusan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI).

e. Kebijakan UPI tentang Program Tutorial PAI dan SPAI UPI

Adanya keinginan kuat para mahasiswa

muslim aktivis masjid al-Furqan InstitutKeguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) untuk memperluas dan memperbesar syiar Islam di dalam kampus, menjadikan mereka kreatif untuk membentuk Program Tutorial. Kala itu, kegiatan taklim (lebih dikenal "kuliah duha") dalam program ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahim bersama antar sesama muslim secara harmonis dari setiap fakultas di IKIP. Awalnya kegiatan taklim (kuliah duha) tidak bersifat wajib. Namun setelah berhasil masuk kedalam kegiatan terstruktur (ko-kurikuler) mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI), sifatnya berubah menjadi wajib bagi mahasiswa pengontrak mata kuliah ini (Penyelenggara Tutorial PAI/SPAI UPI, 2009).

Eksistensi Program Tutorial dan sifat wajibnya itu, semakin kukuh dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor tanggal 28 Desember 2007 dengan nomor 8145/H40/KM/2007 tentang Penetapan Penyelenggaraan Kegiatan Tutorial dan PengangkatanPenyelenggara Kegiatan Tutorial Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Poin penting dari kebijakan ini, dalam pertimbangannya bahwa UPI memandang bahwa Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan dan peran sangat strategis dalam mendukung terciptanya kampus yang religius dan mampu membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (butir b). Kedudukan dan peran strategis Program ini ditekadkan dalam upaya

mewujudkan kampus UPI yang ilmiah, edukatif, dan religius (butir a). Di regulasi itu, Program Tutorial Pendidikan Agama Islam merupakan kegiatan terstruktur yang tidak terpisahkan dari Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (butir c) (Keputusan Rektor UPI Nomor 8145/H40/KM/2007).

Dinamika pemahaman keagamaan dan perilaku kehidupan beragama di tataran kampus menjadi tantangan bagi Program Tutorial PAI untuk semakin dewasa. Maka untuk menjawab tantangan ini, melalui Peraturan Rektor UPI Nomor: 0440/UN40/HK/2016 tentang Program Tutorial Pendidikan Agama Islam dan Seminar Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam regulasi ini, selain Mata Kuliah PAI, Mata Kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam (SPAI) juga menjadi bagian dari Program Tutorial (Peraturan Rektor UPI Nomor: 0440/UN40/HK/2016). Sehingga dengan kebijakan ini, selain digembleng pengetahuan dan *amaliyah yaumiyah*, mahasiswa dirangsang dan dibangun untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Kemampuan ini merupakan bekal mereka untuk memiliki kompetensi literasi agama yang menurut Musdah Muliamengarah kepada karakter humanisasi (kemanusiaan), liberasi (kebebasan), dan transendensi (kebermaknaan) (Nurhaliza, 2022).

f. Eksistensi Masjid Alfurqan dan Islamic Tutorial Centre

Masjid Al Furqan merupakan salah satu masjid terbesar kampus di Indonesia yang dikelola oleh pihak perguruan tinggi yakni Universitas Pendidikan Indonesia. Masjid Al Furqan memiliki rekam sejarah yang cukup panjang seiring dengan perkembangan masjid kampus sejak dari PTPG, IKIP sampai pada Universitas Pendidikan Indonesia. Letak masjid ini berada tepat di halaman depan kampus UPI, seolah menjadi ucapan selamat datang kepada siapapun yang memasuki area kampus, sekaligus menunjukan bahwa UPI sebagai kampus yang relegius. Masjid Al Furqan sebagai Masjid Kampus merupakan bagian tak terpisahkan dari Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai laboratorium pengembangan religiusitas di Kampus UPI. Terlebih UPI memiliki motto Kampus yang Ilmiah, Edukatif, dan Religius, sudah barang tentu harus terefleksikan dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Lahirnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) *Islamic Tutorial Center* (ITC) sebagai salah satu UPT pada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Universitas Pendidikan Indonesia, merupakan peluang dalam rangka pengelolaan ataumanajemen kegiatan keagamaan di Masjid Al Furqan secara lebih profesional, yang pelaksanaannya bersinergi dengan pengurus DKM Al Furqan, dalam merancang, mengkordinasikan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di Universitas PendidianIndonesia.

Masjid Al Furqan UPI begitupun UPT *Islamic*

Tutorial Center memiliki visi yang saling berkaitan yakni menjadikan Masjid Al Furqan sebagai sumber energi bagi kekuatan kehidupan, pusat pembinaan umat dan Pengembanga Syiar Islam *Rahmatan Lil 'alamiin*. Adapun misinya yakni mengembangkan suasana kehidupan kampus dan masyarakat yang religius; meningkatkan wawasan keagaman warga kampus dan masyarakat; membina akhlak mulia warga kampus dan masyarakat; meningkatkan kualitas pembinaan tutorial bagi mahasiswa; meningkatkan pelayanan amal bagi warga kampus dan masyarakat; meningkatkan kerjasama kegiatan keagamaan dengan lembaga dan masyarakat; meningkatkan peran wanita dalam mengembangkan kehidupan keagaman; meningkatkan pelayanan dan pembinaan warga kampus serta masyarakat dalam umrah dan haji; meningkatkan penyebaran dakwah berbasis ICT yang bermutu; dan meningkatkan peran remaja dan pemuda dalam mengembangkan kehidupan keagaman.

Al Furqan sebagai masjid kampus di Universitas Pendidikan Indonesia selain berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat syiar Islam di kampus, selama ini juga menjadi pusat aktifitas pengembangan keilmuan, pembinaan karakter mahasiswa dan siswa, juga sebagai laboratorium PAI. Masjid Al Furqan melalui *Islamic Tutorial Center* senantiasa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Unit Kegiatan Mahasiswa Keislaman seperti UKDM, UPTQ serta

KALAM, begitupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Badan Eksekutif Mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Program Tutorial PAI-SPAI yang melibatkan seluruh mahasiswa muslim yang mengontrak mata kuliah PAI dan Seminar PAI. Pengajian rutinan yang dilaksanakan secara luring maupun daring yang diikuti oleh seluruh civitas akademik UPImeliputi kajian hadits, kajian tafsir tarbawy, sejarah dan isu-isu kontemporer. Selain itu terdapat juga pengajian siswa (SMP dan SMA) yang bekerjasama dengan pihak Labschool UPI, pengajian khusus untuk wanita, serta pengajian lainnya yang besinergi dengan para mahasiswa anggota UKM mapun di BEM atau himpunan.

g. Eksistensi Pusat Kajian Pancasila

Pusat Kajian Pancasila (PKP) Universitas Pendidikan Indonesia merupakan pusat studi pancasila yang bertempat di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI. Secara umum PKP UPI sudah melaksanakan berbagai riset, pengabdian dan kerjasama denganberbagai pihak terkait studi atau kajian ideologi Pancasila.

Beberapa topik riset dan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan PKP UPI terkait dengan kursus kebangsaan, analisi konten muatan materi PKn di persekolahan, dan pembuatan Indeks Demokrasi Pancasila. Bahka beberapa hasil risetnya telah mendapatkanbeberapa HKI dan pendanaan baik dari Universitas, Fakultas,

Prodi, maupun *Matching Fund* dari kementrian Pendidikan da Kebudayaan. Kegiatan riset dan pengabdian tersebut berlokasidi kabupaten Subang, Kota Bandung, Kab Garut, serta beberapa kota lainnya di provinsi JawaBarat.

Sementara itu dalam bidang Kerjasama, sampai saat ini sudah terjalin baik dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Universitas Gadjahmada, Universitas Airlangga, serta perguruan tinggi di sekitar Jawa Barat untuk pengembangan Kajian Ideologi Pancasila. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini dalam bentuk: pembuatan buku, seminar, *Focus Grouf Discussion*, kuliah umum dan kajian strategis terkait perumusan RUUnya.

Program kerjasama yang disebutkan terahir memiliki dampak luas bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan Sekretariat dan pusat Kajian MPR. Selain itu, sebagai pusat kajian, PKP UPI terlibat dalam isu isu strategis yang berkaitan dengan Jawa barat berkoordinasi dengan Kesbangpol Jabar, DPRD Provinsi Jabar, dan Polda Jawa Barat, serta kegiatan bela negara bekerja sama dengan Kementrian Pertahanan.

h. Eksistensi organisasi ekstrakurikuler keagamaan mahasiswa

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus yang memiliki moto Ilmiah, Edukatif, Religius. Salah satu upaya mewujudkan kampus religius, UPI sangat mendukung adanya Unit Kegiatan Mahasiswa bernuansa keagamaan. Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan organisasi kemahasiswaan wadah berkumpulnya mahasiswa yang mempunyai kesamaan minat, bakat, kegemaran atau keahlian tertentu. Merujuk Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia bahwa di tingkat universitas dapat dibentuk Unit Kegiatan Mahasiwa atau disingkat UKM. Sedikitnya ada enam organisasi UKM bernuansa keislaman dan satu UKM bernuansa Kristen. Adapun UKM yang bernuansa keislaman yaitu UKM Belajar Al-Quran Intensif (BAQI), UKM Unit Pengembangan TilawatilQur'an UPTQ, UKM Lembaga Dakwah Kampus Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa (LDK UKDM), UKM Kajian Islam Mahasiswa (KALAM), Study Community Of Islamic Economics(SCIEmics), UKM Kepenulisan Islami Al-Qolam,. Sedangkan UKM yang bernuansa Kristen yaitu UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK).

Enam UKM Bernuansa Keislaman di UPI memiliki fokus dan kekhasan masing- masing. BAQI merupakan UKM yang fokus memberantas buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa. Upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran ini bekerja sama dengan Dosen PAI. UPTQ berfokus pada pengembangan tilawatil quran dan seni Islami. LDK UKDM berfokus pada syiar Islam di kampus dan menjadikan Islam sebagai *way of life*. KALAM berfokus pada kajian Islam bagi mahasiswa.

Sedangkan kajian ekonomi Islam merupakan fokus garapan SCIEmics. Kepenulisan Islami Al-Qolam memiliki bidang garapan tentang kepenulisan ilmiah dan Islami. Adapun UKM yang bernuansa Kristen yaitu UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) menghimpun mahasiswa yang beragama Kristen dan memfasilitasi kegaiatn rohani Kristen. UKM Keagamaan tersebut menjadi modal dan kekuatan bagi UPI dalam mewujudkankampus yang religius dan moderat.

8. Implikasi Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Islam Nusantara

Pengimplementasian pendidikan moderasi beragama dalam pembelajaran akan memberikan umpan balik atau respon dari cara bersikap dan kebiasaan yang tampak pada mahasiswa Penanaman nilai-nilai yang moderat akan berpengaruh besar pada proses interaksi dan menumbuhkembangkan sikap sosial yang baik. Sikap sosial secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lain saling ketergantungan dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ditinjau dari sudut psikososial (kejiwaan kemasyarakatan), sikap sosial adalah usaha menumbuh kembangkan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal (hubungan antar individu) yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisasi (Sujanto, 2004).

Sikap sosial merupakan kesadaran seseorang individu yang menentukan perubahan nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang

lain dan mementingkan tujuan-tujuan sosial daripada tujuan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan sikap sosial siswa yaitu proses perkembangan kepribadian mahasiswa sebagai seorang anggota masyarakat dalam hubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Oleh karena itu pendidik ataupun orang tua harus mampu memberikan keseimbangan dengan memberikan sebanyak mungkin rangsangan dan kesempatan kepada anak untuk melakukan konsep diri secara maksimal. Sikap timbul dikarenakan ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya: kampus, keluarga, golongan agama, norma dan adat istiadat. Sikap tidak akan terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap objek tertentu atau suatu objek (Ahmadi, 2007).

Beberapa prinsip moderasi beragama berdasarkan (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019, 2020), ialah Tawassuth (mengambil jalan tengah), Tawazun (berkeseimbangan), I'tidal (lurus dan tegas), Tasamuh (toleransi), Musawah (persamaan), Syura (musyawarah), Al-Muwathanah (cinta tanah air), Al-Laa'Unfu (anti kekerasan), dan Al-Qudwah (peloporan). Moderasi beragama mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai,

budaya dan kebangsaan. Beberapa indikatornya, ialah komitmen kebangsan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan moderasi inilah yang perlu ditanamkan dandibiasakan oleh peserta didik, sehingga menjadi peserta didik yang memiliki karakter yang baik dan berjiwa sosial yang tinggi.

Impikasi dari nilai-nilai pendidikan moderasi beragama terhadap sikap sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut (Hasan, 2021):

a. Tawasuth (tengah-tengah) yaitu mengutamakan sifat penengah, mengutamakan keseimbangan
b. I'tidal (tegak-lurus) yaitu membela kebenaran, bersikap adil
c. Tasamuh (toleransi) yaitu kedamaian, menghargai perbedaan, memiliki kesadaran, terbuka dan reseptif.
d. Syura (musyawarah) yaitu jujur, saling menghargai pendapat, tutur kata yang baik, kesabaran, kesadaran berbicara, bersedia berpendapat, mendengar pendapat orang lain.
e. Ishlah (reformasi) yaitu keterbaruan, uptodate, perbaikan.
f. Qudwah (kepeloporan) yaitu memiliki potensi dan keterampilan
g. Muwathanah (kewarganegaraan) yaitu perilaku membantu orang lain, ketelitian, sportif, menjaga hubungan baik, kebijaksanaan,

h. Al-La”Unfu (anti kekerasan) yaitu saling percaya, kerjasama, tenggang rasa, penerimaan terhadap perbedaan, penghargaan.
i. I’tibar al-‘Urf (ramah budaya) yaitu menghargai budaya dan menjaga budaya

9. Implikasi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Garut

Implikasi dari program "Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara" di Universitas Garut dapat mencakup sejumlah dampak positif terhadap mahasiswa, staf, dan lingkungan kampus secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin terjadi:

a. Peningkatan Pemahaman Agama: Program ini dapat membawa dampak positif terhadap pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai agama, memperkuat keyakinan spiritual, dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman kepercayaan.
b. Toleransi Antarumat Beragama: Melalui kegiatan-kegiatan yang mempromosikan dialog dan interaksi antarumat beragama, program ini dapat meningkatkan tingkat toleransi dan mengurangi potensi konflik berbasis agama di kampus.
c. Pembentukan Karakter Moderat: Mahasiswa yang terlibat dalam program ini dapat mengembangkan karakter moderat yang mendasari sikap inklusif, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesediaan untuk berdialog.
d. Semangat Bela Negara yang Positif: Program bela negara dapat memotivasi mahasiswa untuk

memiliki semangat patriotisme yang positif, mengidentifikasi cara-cara mereka dapat berkontribusi pada pembangunan negara, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

e. Penguatan Komunitas Kampus: Aktivitas moderasi beragama dan bela negara dapat memperkuat ikatan di antara anggota komunitas kampus, menciptakan lingkungan yang lebih kokoh dan mendukung.

Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme: Melalui pendekatan moderasi, program ini dapat berkontribusi pada upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme di kalangan mahasiswa, menjadikan kampus sebagai tempat yang aman dari pengaruh yang merugikan.

BAB III
KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

A. Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum

Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa, namun juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun moderasi beragama dan bela negara di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang menghargai keragaman, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama, serta menolak paham radikal, ekstrem, dan intoleran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap negara dan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara.

Untuk mewujudkan moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam telah meluncurkan program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas, bimbingan, dan pembinaan kepada mahasiswa PTU dalam memahami dan mengamalkan moderasi beragama dan bela negara, serta mengembangkan potensi dan kreativitas mereka dalam bidang akademik, sosial, dan kewirausahaan.

Salah satu indikator keberhasilan program GMBBN adalah terbentuknya Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara (IMBBN) pada sembilan PTU yang menjadi mitra Kementerian Agama. IMBBN adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, berdasarkan empat aspek, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan. IMBBN disusun dengan menggunakan metode survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan para dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara (IMBBN) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, berdasarkan empat aspek, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan. IMBBN disusun dengan menggunakan metode survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan para dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

IMBBN memiliki rentang skor antara 1 sampai 5, di mana 1 berarti sangat rendah, 2 berarti rendah, 3 berarti sedang, 4 berarti tinggi, dan 5 berarti sangat tinggi. Skor IMBBN dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa PTU telah memahami dan mengamalkan moderasi beragama dan bela negara, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan.

IMBBN juga dapat menjadi alat evaluasi dan monitoring bagi program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) yang diluncurkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas, bimbingan, dan pembinaan kepada mahasiswa PTU dalam memahami dan mengamalkan moderasi beragama dan bela

negara, serta mengembangkan potensi dan kreativitas mereka dalam bidang akademik, sosial, dan kewirausahaan.

IMBBN merupakan salah satu bentuk implementasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Kerja sama ini juga melibatkan 13 Kementerian lainnya, seperti Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan kementerian lainnya.

IMBBN menjadi salah satu bukti bahwa program GMBBN telah memberikan dampak positif bagi pengembangan moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU. Program ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi PTU lainnya untuk mengikuti jejak sembilan PTU yang menjadi mitra Kementerian Agama. Dengan demikian, moderasi beragama dan bela negara dapat menjadi karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam.

Hasil IMBBN menunjukkan bahwa sembilan PTU yang menjadi mitra Kementerian Agama memiliki tingkat moderasi beragama dan bela negara yang cukup tinggi, dengan rata-rata skor 4,2 dari skala 1 sampai 5. PTU yang memiliki skor tertinggi adalah Universitas Wahid Hasyim Semarang (UNWAHAS) dan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) dengan skor 4,3, dikiuti oleh Universitas Gajah MAda (UGM), Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Garut (UNIGA), dan Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Indonesia (UI) dengan skor 4,2, diikuti oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan skor 4,1.

B. Evaluasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum

Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa, namun juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun moderasi beragama dan bela negara di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa perguruan tinggi umum (PTU).

Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang menghargai keragaman, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama, serta menolak paham radikal, ekstrem, dan intoleran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap negara dan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara.

Untuk mewujudkan moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam telah meluncurkan program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas, bimbingan, dan pembinaan kepada mahasiswa PTU dalam memahami dan mengamalkan moderasi beragama dan bela negara, serta mengembangkan potensi dan kreativitas mereka dalam bidang akademik, sosial, dan kewirausahaan.

Salah satu indikator keberhasilan program GMBBN adalah terbentuknya Indek Moderasi Beragama dan Bela

Negara (IMBBN) pada sembilan PTU yang menjadi mitra Kementerian Agama. IMBBN adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, berdasarkan empat aspek, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan. IMBBN disusun dengan menggunakan metode survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan para dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Narasi ini akan membahas tentang evaluasi moderasi beragama dan bela negara pada sembilan PTU yang menjadi mitra Kementerian Agama, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Wahid Hasyim Semarang (UNWAHAS), Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (UPI), Universitas Islam Nusantara (UNINUS), dan Universitas Garut (UNIGA). Evaluasi ini akan meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, analisis, dan rekomendasi.

1. Latar Belakang

   Latar belakang evaluasi moderasi beragama dan bela negara pada sembilan PTU adalah sebagai berikut:

   a. Program GMBBN merupakan salah satu bentuk implementasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Kerja sama ini juga melibatkan 13 Kementerian lainnya, seperti Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan kementerian lainnya.
   b. Program GMBBN juga merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk menghadapi potensi

radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di kalangan mahasiswa PTU, yang menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan berbagai lembaga riset tidak pernah tidur apalagi hilang.

c. Program GMBBN juga merupakan respons Kementerian Agama terhadap tantangan paham intoleransi dan radikalisme yang intens dari berbagai arah dan pola yang beragam, yang menimbulkan kecemasan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa PTU, yang sedang mengalami transisi menuju usia dewasa yang identik dengan proses pencarian tujuan hidup, krisis identitas, dan masa-masa mempertanyakan berbagai kemapanan.
d. Program GMBBN juga merupakan inisiatif Kementerian Agama untuk memperkuat konteks upaya menjaga dan mengembangkan toleransi dan persatuan di PTU, yang telah dilakukan melalui kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT) dan pembelajaran Mata Kuliah Agama.
e. Program GMBBN juga merupakan strategi Kementerian Agama untuk mengoptimalkan peran dosen dan mahasiswa PAI di PTU, yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan pembaharu dalam bidang moderasi beragama dan bela negara.

2. Tujuan

Tujuan evaluasi moderasi beragama dan bela negara pada sembilan PTU adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui sejauh mana program GMBBN telah memberikan dampak positif bagi pengembangan moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, baik dari segi pengetahuan, sikap, perilaku, maupun lingkungan.

b. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program GMBBN, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.
c. Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan bagi program GMBBN, agar dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuannya.

3. Metode

Metode evaluasi moderasi beragama dan bela negara pada sembilan PTU adalah sebagai berikut:

a. Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan selama atau setelah program berjalan, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik dan masukan bagi perbaikan program.
b. Pendekatan evaluasi yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods), yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data.
c. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada sampel acak dari mahasiswa PTU yang terlibat dalam program GMBBN. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan aspek IMBBN, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan. Wawancara dilakukan kepada informan kunci, yaitu para dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan program GMBBN. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas dan interaksi yang terjadi di lingkungan PTU yang terkait dengan program GMBBN. Dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan program GMBBN, seperti laporan, proposal, nota kesepahaman, modul, buku, artikel, dan perihal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV
MODERASI BERAGAMA DAN BELA NEGARA SEBAGAI STRATEGI DAN PENCEGAHAN RADIKALISME PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

A. Strategi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum

Moderasi beragama dan bela negara adalah dua hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang merupakan negara yang majemuk dan beragam. Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang menghargai keragaman, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama, serta menolak paham radikal, ekstrem, dan intoleran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap negara dan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara.

Generasi muda, khususnya mahasiswa perguruan tinggi umum (PTU), merupakan salah satu kelompok yang harus diberdayakan dan dibina dalam moderasi beragama dan bela negara, karena mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan pembaharu dalam bidang tersebut. Namun, mereka juga rentan terhadap pengaruh negatif dari paham intoleransi dan radikalisme yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam telah meluncurkan program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) pada tahun 2022. Program ini bertujuan

untuk memberikan fasilitas, bimbingan, dan pembinaan kepada mahasiswa PTU dalam memahami dan mengamalkan moderasi beragama dan bela negara, serta mengembangkan potensi dan kreativitas mereka dalam bidang akademik, sosial, dan kewirausahaan.

Salah satu indikator keberhasilan program GMBBN adalah terbentuknya Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara (IMBBN) pada sembilan PTU yang menjadi mitra Kementerian Agama, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Wahid Hasyim Semarang (UNIWAHAS), Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (UPI), Universitas Islam Nusantara (UNINUS), dan Universitas Garut (UNIGA). IMBBN adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, berdasarkan empat aspek, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan.

Adapun strategi moderasi beragama dan bela negara yang dilakukan oleh sembilan PTU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Indonesia (UI)

   Strategi MBBN di UI melelui beberapa Program kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, toleransi, dan dialog antarumat beragama. Beberapa program unggulan moderasi beragama yang dapat diimplementasikan di berbagai lembaga, termasuk di kampus, meliputi:

a. Diskusi Interfaith: Menyelenggarakan serangkaian diskusi dan forum antarumat beragama untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan kepercayaan dan menciptakan dialog yang konstruktif.
b. Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara: Mengadakan program pelatihan untuk mengembangkan kepemimpinan mahasiswa dan kesadaran terhadap tanggung jawab bela negara.
c. Proyek Pelayanan Masyarakat: Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat yang mendukung pembangunan lokal dan nasional.
d. Pembinaan Karakter: Menyelenggarakan kegiatan dan seminar yang mendukung pengembangan karakter mahasiswa, termasuk nilai-nilai moderasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

2. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Gajah Mada (UGM)

Strategi MBBN di UI melelui beberapa Program kegiatan diantaranya adalah:

a. Pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan bela negara bagi mahasiswa, dosen, dan staf UGM
b. Penelitian dan pengembangan moderasi beragama dan bela negara di Indonesia
c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang moderasi beragama dan bela negara.
d. Ditunjuknya Fakultas Filsafat sebagai sentral pemahaman ideologi dan karakter.

e. Integrasi muatan Moderasi Beragama dalam mata kuliah PAI
f. Integrasi muatan Moderasi Beragama dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.
g. Studium General dengan Mendatangkan tokoh dari BNPT dan korban/mantan teroris untuk pencegahan pemahaman radikal.
h. Masjid Kampus Sebagai benteng pemahaman ideologi salah satunya melalui isi khutbah.

3. Griya Moderasi Beragama dan Bela Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Strategi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melalui Subdit Ideologi, Moderasi Beragama, dan Bela Negara (IMBN) Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis UNESA melalui beberapa Program Kerja sebagaimana berikut:

a. Sekolah dan Kampanye Online dan Offline Pancasila, Moderasi Beragama dan Bela Negara
b. Seminar dan Kompetisi Konten Kreatif Bertema Ideologi Pancasila, Moderasi Beragama dan Bela Negara
c. Penyusunan karya buku bertema ideologi dan MBBN
d. Interfaith Camp dan Kebangsaan
e. Kajian Isu Strategis IMBBN di Fakultas-fakultas
f. Survey dan Pemetaan Potensi Kerawanan IMBBN

4. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Negeri Malang (UM)

Strategi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universitas Negeri Malang melalui program kerja sebagai berikut:

a. Forum Mahasiswa Lintas Agama
b. Pengaktifaan Media Informasi
c. Sekolah Moderasi Beragama dan Bela Negara
d. Pembuatan Campign Moderasi Beragama dan Bela Negara
e. Refleksi Kebangsaan Akhir Tahun
f. Kunjungan Silaturahmi Rumah Ibadah Lintas Agama
g. Leadership and National Defense Program

5. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Islam Malang (UNISMA)

Strategi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universitas Islam Malang (UNISMA) melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan yang berbasis moderasi beragama dan bela negara.
b. Membina, meningkatkan dan menguatkan moderasi beragama dan bela negara melalui kegiatan yang berbasis *ahlussunnah wal jama'ah*.
c. Membimbing dan menguatkan habituasi dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan bela negara

6. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS)

Strategi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berkolborasi dengan Pusat Kajian Aswaja dan Pergerakan Mahasiswa MBBN Unwahas dalam melaksanakan Program Kegiatan yang berkaitan dengan Penguatan MBBN sebagaimana berikut:

a. *screening* ideologi pada mahasiswa baru
b. Memasukkan materi MBBN melalui Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Agama Islam, Ke-Aswajaan, Pancasila dan Kewarganegaraan
c. Kuliah MBBN yang dilaksana Pergerakan Mahasiswa MBBN
d. Koordinasi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Agama Islam terkait MBBN.

7. Griya Moderasi dan Bela Negara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Strategi pelaksanaan penguatan moderasi beragama dan bela negara di Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan pihak Rektorat secara rutin akan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menghasilkan Kebijakan Universitas Pro Moderasi Beragama dan Bela Negara, seperti:

a. Kebijakan yang memfasilitasi pendidikan agama bagi mahasiswa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
b. Kebijakan Masa Orientasi Kampus (MOKAKU) Berwawasan Bela Negara.
c. Pelatihan Penangkal Radikalisme bagi Mahasiswa
d. Dialog Rutin Antar Umat Beragama bagi Dosen dan Mahasiswa.
e. Infusi Perkuliahan untuk Moderasi Agama dan Bela Negara (IP-MBBN)
f. advokasi non-litigasi
g. Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Griya Moderasi dan Bela Negara Universitas Islam Nusantara (UNINUS)

   Strategi pelaksanaan penguatan moderasi beragama dan belanegara di UNINUS melalui Program kegiatan GMBN diantaranya:

   a. Mendukung pelaksanaan tugas kementerian dalam mewujudkan moderasi beragama dan bela negara;
   b. Menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi moderasi beragama dan bela negara;
   c. Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi moderasi bergama dan bela negara kepada instansi pemerintah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat;
   d. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan daerah;
   e. Melakukan penguatan moderasi beragama dan bela negara melalui tridharma perguruan tinggi;
   f. Melakukan pelatihan moderasi beragama dan bela negara kepada civitas akademika perguruan tinggi umum dan masyarakat;
   g. Melakukan penelitian moderasi beragama dan bela negara;

9. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara Universitas Garut (UNIGA)

   Strategi Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Universita Garut, melaksanakan hal-hal sebagai berikut

   a. Diskusi dan Seminar: Mengadakan serangkaian diskusi dan seminar yang membahas nilai-nilai moderasi

beragama, toleransi, dan peran mahasiswa dalam bela negara. Menyertakan narasumber ahli dari berbagai latar belakang agama dan bidang keilmuan.

b. Pelatihan Keterampilan Dialog: Menyelenggarakan pelatihan untuk mahasiswa dan staf tentang keterampilan dialog, komunikasi efektif, dan pemahaman perbedaan agama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.
c. Kegiatan Keagamaan Bersama: Mengorganisir kegiatan keagamaan bersama, seperti doa bersama, upacara keagamaan yang melibatkan berbagai agama, dan kegiatan keagamaan kolaboratif untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.
d. Pengembangan Kurikulum: Mengintegrasikan moderasi beragama dan bela negara dalam kurikulum melalui mata kuliah khusus, seminar, atau proyek penelitian yang mempromosikan pemahaman dan praktik moderasi beragama.
e. Program Pelayanan Masyarakat: Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat yang mendukung pembangunan lokal dan nasional serta menguatkan semangat bela negara.
f. Kunjungan ke Tempat Ibadah Berbeda: Merencanakan kunjungan mahasiswa ke tempat-tempat ibadah yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik keagamaan dan keberagaman budaya.
g. Pameran Kebudayaan dan Agama: Mengadakan pameran yang merayakan keberagaman kebudayaan dan agama di kampus, termasuk pameran seni,

pertunjukan budaya, dan presentasi kuliner dari berbagai tradisi.

h. Pengembangan Materi Edukasi: Membuat materi edukasi dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh anggota kampus, seperti brosur, poster, dan sumber daya online yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan bela negara.
i. Konseling Agama dan Kebutuhan Spiritual: Menyediakan layanan konseling agama dan kebutuhan spiritual bagi mahasiswa untuk memberikan dukungan dalam menjalani perjalanan keagamaan mereka.
j. Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program-program moderasi beragama dan bela negara serta menyesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi.

B. Pencegahan Radikalisme melalui Moderasi Beragama dan Bela Negara di Perguruan Tinggi Umum

Moderasi beragama dan bela negara memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya berjalan beriringan saling melengkapi dengan cara membentuk pola pikir, sikap dan perilaku cinta tanah air (hubul wathon), mencintai keberagaman dan keberagamaan terhadap seluruh warga negara. Konkritnya moderasi beragama dan bela negara harus mulai tertanam dalam lingkungan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi.

Mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat toleransi adalah tujuan strategis yang diwujudkan melalui pendekatan moderasi beragama. Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, penting untuk mengembangkan

pemahaman dan sikap moderasi beragama guna membangun saling pengertian, memperkuat kesadaran terhadap keragaman, dan memperkuat persatuan antara umat beragama yang berbeda melalui pendekatan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Perguruan Tinggi (PT) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam upaya melahirkan intelektual, ilmuan, dan profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Sayangnya, beberapa tahun belakangan Perguruan Tinggi justru menjadi ladang subur kaderisasi kelompok-kelompok yang berupaya merongrong eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setara Institute (2019 : 25) mencatat pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah terpapar paham radikalisme, di mana semuanya notabene merupakan Perguruan Tinggi dengan nama-nama besar.

Kondisi ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi di Perguruan Tinggi lain yang jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi (PPDIKTI) tahun 2019 jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.621 dengan pembagian 3.129 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 122 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 1.192 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan 178 Perguruan Tinggi Kementerian (PTK). Di sinilah tantangan yang sesungguhnya bagi negara untuk mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar menjadi garda terdepan penguatan moderasi beragama dan bela negara.

Internalisasi Moderasi beragama dan bela negara di Perguruan Tinggi sejauh ini dilaksanakan melalui pelaksanaan

kurikulum yang wajib memuat mata kuliah agama, mata kuliah kewarganegaraan dan mata kuliah pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Namun, nyatanya hal tersebut belumlah cukup memadai guna memperkuat moderasi beragama dan bela negara di Perguruan Tinggi. Apalagi jika kurikulum pada matakuliah agama, kewarganegaraan dan pancasila tidak diarahkan secara sungguh- sungguh untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang mencerminkan moderasi beragama dan bela negara.

Pada tahun 2020, pemerintah telah menetapkan moderasi beragama sebagai program prioritas Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Untuk melaksanakan program tersebut, Kementerian Agama sebagai leading sector moderasi beragama telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 yang mengatur Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada pendidikan Islam, hingga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 yang memberikan petunjuk teknis tentang Rumah Moderasi Beragama. Dengan adanya dua paket kebijakan ini, moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diperkuat melalui pendirian rumah moderasi beragama di beberapa PTKI.

Rumah Moderasi beragama didesain sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Oleh karenanya dengan berdirinya rumah moderasi bragama di PTKI diharapkan pelaksanaan

moderasi beragama dapat berjalan secara baik dan terukur. Sebagai pelaksana moderasi beragama di PTKI, rumah moderasi beragama mendapatkan bimbingan atau arahan langsung dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam.

Jika di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah memiliki pelaksana moderasi beragama melalui rumah moderasi beragama. Perguruan Tinggi Umum (PTU) atau perguruan tinggi selain PTKI sejauh ini belum memiliki pelaksana moderasi beragama. Moderasi beragama dilaksanakan secara terbatas melalui pengajaran pada mata kuliah agama. Sedangkan pelaksanaan bela negara dijalankan melalui pengajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Keterbatasan tersebut haruslah dicarikan jalan keluar, yaitu dengan cara membentuk, mengadopsi, merekonstruksi konsep rumah moderasi beragama yang telah ada di PTKI menjadi "Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara" di PTU.

Pembentukan Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di PTU dapat mendorong PTU menjadi gerbong terdepan dalam upaya penguatan moderasi beragama dan bela negara di Indonesia bersama-sama dengan PTKI. Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara diarahkan untuk melakukan 3 (tiga) agenda utama. Pertama, Pendidikan dan Pelatihan. Kedua. Kajian, penelitian dan Publikasi, dan Ketiga, Advokasi dan pendampingan masyarakat

Kenapa moderasi beragama dan bela negeri menjadi hal penting untuk dijadikan proyek perubahan pada PTU dan tidak cukup moderasi beragama pada PTU yang sudah menjadi RPJM pemerintah dalam hal ini kemenag RI, hal

tersebut setidaknya ada beberapa analisis di antaranya;

1. Semangat patriotisme dan nasionalisme sejalan dengan moderasi beragama, karena dalam moderasi beragama ditumbuh kembangkan bahwa membela negara (tidak hanya agama) juga termasuk jihad.
2. Perlunya mensosialisasikan jargon *Huhhul wathan minal iman*
3. PTU di bawah mendikbudristek dikti belum ada sebuah regulasi, sistem yang baku untuk mengawal islam moderat serta cinta tanah air pada PTU maka perlu model GMNB
4. Moderasi beragama sudah distigmasisasi milik PKTIN sehingga terkadang penerimaan pada PTU yang diberikan kemandirian oleh pemerintah menyebabkan dimungkinkan ditolak sehingga MBBN ini sebuah solusi
5. Dewasa ini dalam menanggulangi paham radikalisme tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tapi harus kolaborasi dan MBBN ini mewujudkan kolaborasi 3 kementerian (Kemenag, Kemhan, kemdikbudristek dikti)

MBBN menjadi sebuah kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, melihat dari faktualnya bahwa kalau bela negara cuma di aparatur (TNI, Polri) sedangkan kalau moderasi beragama di kementerian agama, maka penggerak masyarakat sipil adalah disemeni keagamaan dan semangat bergerak itu harus diimbangi dengan pelatihan strategi selaras yang sudah dicontohkan dalam resolusi jihad Hadratusy Syaikh KH. M. Hasyim Asyari.

REFLEKSI

Moderasi beragama dan bela negara di Perguruan Tinggi Umum (PTU) adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menghargai keragaman, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama, serta memiliki kecintaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap negara dan bangsa. Konsep ini diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti kurikulum, kegiatan, fasilitas, jejaring, dan evaluasi, yang dilakukan oleh PTU bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Konsep ini juga diukur dengan menggunakan instrumen Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara (IMBBN), yang meliputi empat aspek, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan.

Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) adalah sebuah upaya untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menghargai keragaman, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama, serta memiliki kecintaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap negara dan bangsa. Implementasi ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti:

1. Kurikulum: PTU menyusun dan menerapkan kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT) dan kurikulum Mata Kuliah Agama, yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan bela negara dalam pembelajaran. Contohnya, UI memiliki kurikulum MPKT yang disebut dengan MPK Agama, yang terdiri dari tiga modul, yaitu Agama dan Kebangsaan, Agama dan Kemanusiaan, dan Agama dan Peradaban.

2. Kegiatan: PTU menyelenggarakan dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama dan bela negara, baik di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan ini dapat berupa seminar, diskusi, workshop, pelatihan, studi banding, kunjungan, bakti sosial, aksi damai, kampanye, lomba, festival, pameran, dan lain-lain. Contohnya, UNESA memiliki kegiatan yang disebut dengan Festival Moderasi Beragama dan Bela Negara, yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) UNESA.
3. Fasilitas: PTU menyediakan dan memanfaatkan fasilitas yang mendukung moderasi beragama dan bela negara, baik fisik maupun non-fisik. Fasilitas fisik dapat berupa ruang, gedung, peralatan, buku, dan lain-lain. Fasilitas non-fisik dapat berupa dana, sumber daya manusia, modul, media, dan lain-lain. Contohnya, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam telah meluncurkan program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) pada tahun 2022, yang merupakan fasilitas non-fisik berupa bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa PTU dalam moderasi beragama dan bela negara.
4. Jejaring: PTU menjalin dan mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak yang terkait dengan moderasi beragama dan bela negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Jejaring ini dapat berupa kerja sama, kemitraan, pertukaran, kunjungan, dan lain-lain. Contohnya, Kementerian Agama telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertahanan dan 13 Kementerian lainnya tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara, yang merupakan jejaring antar-lembaga negara dalam moderasi beragama dan bela negara.

5. Evaluasi: PTU melakukan dan mengikuti evaluasi tentang moderasi beragama dan bela negara, baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi ini dapat berupa survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat moderasi beragama dan bela negara, serta memberikan umpan balik dan masukan bagi perbaikan. Contohnya, Kementerian Agama telah membentuk Indek Moderasi Beragama dan Bela Negara (IMBBN), yang merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat moderasi beragama dan bela negara di kalangan mahasiswa PTU, berdasarkan empat aspek, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan lingkungan.

Implikasi moderasi beragama dan bela negara dalam mencegah radikalisme pada perguruan tinggi umum adalah sebagai berikut:

1. Moderasi beragama dan bela negara dapat membentuk karakter mahasiswa yang menghargai keragaman, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama, serta memiliki kecintaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap negara dan bangsa. Hal ini dapat mencegah mahasiswa terpapar oleh paham intoleransi dan radikalisme yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.
2. Moderasi beragama dan bela negara dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa yang beretika, beragama, dan bermasyarakat, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang berkaitan dengan agama dan etika. Hal ini dapat mencegah mahasiswa terjebak oleh ajaran dan ideologi radikalisme yang bersifat dogmatis, eksklusif, dan destruktif.

3. Moderasi beragama dan bela negara dapat mengembangkan kompetensi beragama yang adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan modernisasi, serta mengakomodasi kebudayaan dan kearifan lokal dalam beragama. Hal ini dapat mencegah mahasiswa teralienasi oleh ajaran dan ideologi radikalisme yang bersifat rigid, stagnan, dan reaksioner.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid. "Nasionalisme, Tasawwuf, Dan Demokratisasi." *Kompas*, 2001.

Al-Fadhlullah, Sayyid Ali. *Hubb Al-Wathan Min Al-Îmân*. Taheran, 1439.

Asghar Ali Enginer. *Devolusi Negara Islam, Terj. Imam Muttaqin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Dhakidae, Daniel. *Indonesia Dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Gunawan, Roland. "Islam Dan Cinta Tanah Air," 2019. https://rumahkitab.com/islam-dan-cinta-tanah-air/.

Hanafi, Yusuf. "MENDESAIN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERWAWASAN MODERASI BERAGAMA UNTUK MEMBENTUK PESERTA DIDIK YANG TOLERAN DAN MULTIKULTURAL." Malang, 2021. http://repository.um.ac.id/1193/1/fullteks 2.pdf.

Hendri Purbo Waseso dan Anggitiyas Sekarinasih. "MODERASI BERAGAMASEBAGAI HIDDEN CURRICULUMDI PERGURUAN TINGGI." *Jurnal Educandum* 7, no. 1 (2021). https://blamakassar.e-journal.id/educandum/article/view/490.

I. Ibrahim, D. Wulansari, N. Hidayat. "Radicalism in Indonesia and the Reflective Alternatives to Reduce." *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 3, no. 3 (2017): 1554–1564.

Ikhsan, M. Alifudin. "NILAI - NILAI CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (December 12, 2017): 108–14. https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p108.

Keraf, Gorys. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah, 1980.

Ma'arif, S. "Islam Dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan)." In *Annual Conference on Islamic Studies Proceeding*. Bandung, 2006.

Madjid, M. Adnan, Eri R. Hidayat, and Ningsih Susilawati. "THE TREND OF CONFLICT IN INDONESIA 2016." *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 3, no. 3 (December 5, 2017): 268–79. https://doi.org/10.20319/pijss.2017.33.268279.

Muhammad, Sayyid. *Al-Tahliyah Wa Al-Targhîb Fi Al-Tarbiyah Wa Al-Tahdzîb*. Kediri: al-Ma'had al-Islami Lirboyo Kediri, n.d.

Najahan Musyafak, Imam Munawar, Noor Lailatul Khasanah, Fitri, and Ariana Putri. "DISSIMILARITY IMPLEMENTASI KONSEP MODERASI BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM." In *Prosiding Muktamar Dosen PMII*, 2021.

Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Rahardjo, T. "Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa Sudah Mengkhawatirkan." Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019. http://lipi.go.id/berita/single/RADIKALISME-DI-

KALANGANMAHASISWA-%0ASUDAH-MENGKHAWATIRKAN/18630.

Rosyida Nurul Anwar, Siti Muhayati. "UPAYA MEMBANGUN SIKAP MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI UMUM." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.7717.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penulis Rumah Kitab. *Kumpulan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, Cet. 2*. Jakarta: Rumah Kitab, 2017.

Ubaidillah, and Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Wirartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

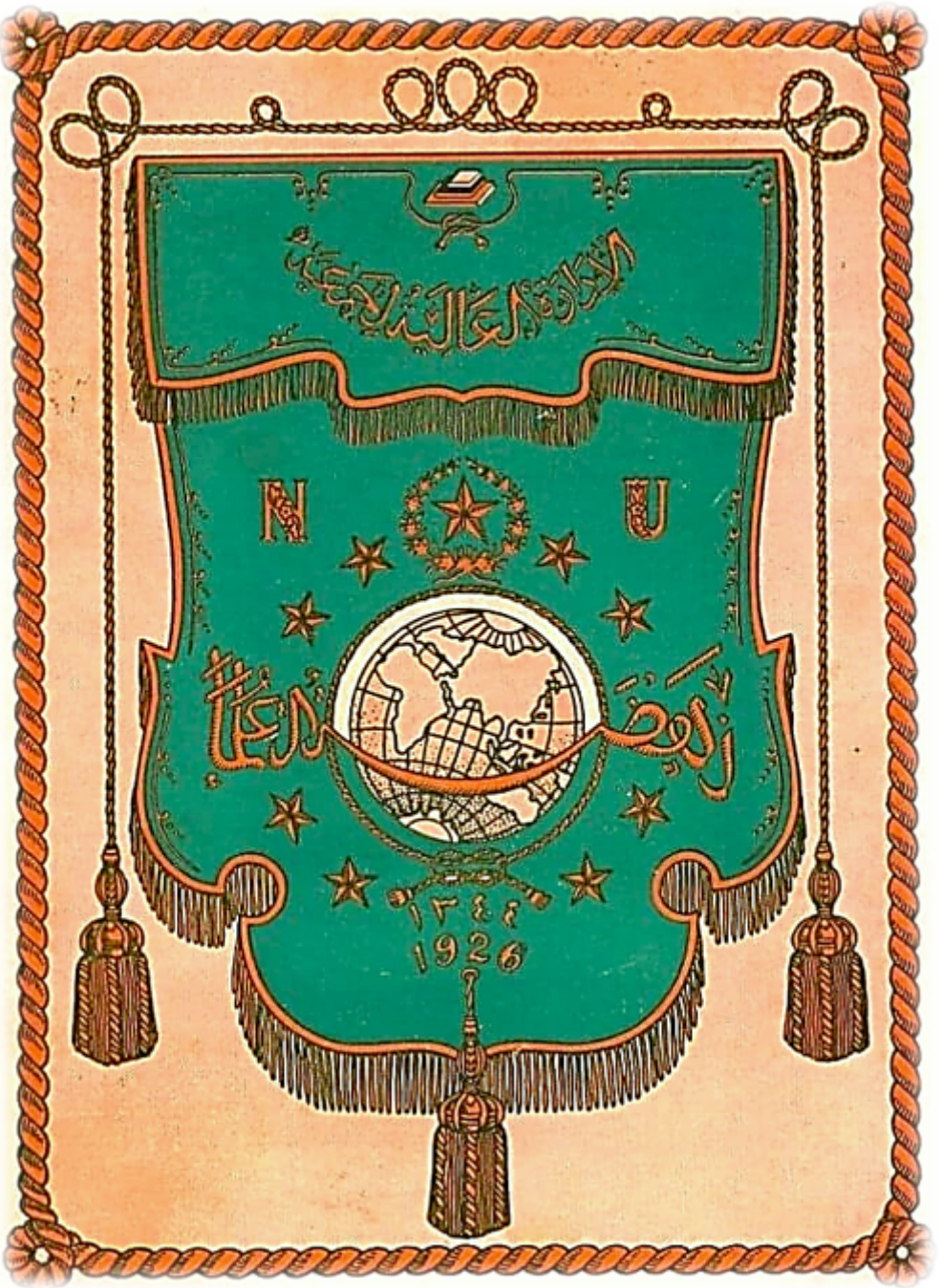
الإدارة العالية لجمعية
N
U
الفضل العام
١٣٤٤
1926

unwahas

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG – INDONESIA

www.unwahas.ac.id

Buku yang berjudul **"Implementasi Moderasi Beragama dan Bela Negara pada Perguruan Tinggi Umum"** adalah sebuah buku yang membahas tentang pentingnya Moderasi Beragama dan Bela Negara di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. Buku ini menguraikan konsep, strategi, dan program penguatan Moderasi Beragama dan Bela Negara yang difasilitasi oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Buku ini juga menyajikan hasil penelitian dan studi kasus tentang fenomena radikalisme dan ekstremisme di beberapa perguruan tinggi umum di Indonesia, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulanginya. Buku ini ditulis oleh beberapa akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang moderasi beragama dan bela negara.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami dan mengamalkan moderasi beragama sebagai cara beragama yang adil, seimbang, toleran, dan anti-kekerasan, serta bela negara sebagai komitmen kebangsaan yang akomodatif terhadap keragaman budaya dan agama. Buku ini juga memberikan gambaran tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa perguruan tinggi umum dalam menghadapi isu-isu radikalisme dan ekstremisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Buku ini menawarkan solusi dan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan kolaboratif, melalui program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara (GMBBN) yang diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan inspirasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, agama, dan pertahanan, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Umum.

Wahid Hasyim University Press
Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan – Semarang 50232
Telp. 024 8505680
Email: wahidhasyimpress@unwahas.ac.id

ISBN 978-623-5360-10-2